

**DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011-2018 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Desi Rahmianti
NIM: 18913009

Pembimbing:
Dr. Anton Priyo Nugroho SE., MM.

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Rahmianti

NIM : 18913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2020

Yang menyatakan,



Desi Rahmianti



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: masteristamw.uli.ac.id
Email: misi@uli.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2203/PS-MIAI/Peng./III/2020

TESIS berjudul : **DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN PADA
KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2011-2018
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Desi Rahmiyanti

N. I. M. : 18913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 17 Maret 2020
Ketua,


Dr. Dra. Junanah, MIS





**TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Nama : Desi Rahmiyanti
Tempat/tgl lahir : Kupang, 26 Desember 1996
N. I. M. : 18913009
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN PADA
KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2011-2018
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)
Penguji : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y. M.Ag (.....)
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 11 Maret 2020

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master@islam.uin.ac.id
Email : ms@uin.ac.id

NOTA DINAS
No. : 1971/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : **DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN PADA
KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2011-2018 DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Desi Rahmiyanti

NIM : 18913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Pengujian Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Ketua

Dr. Dra. Junanah, MIS



PERSETUJUAN

Judul : **Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Nama : Desi Rahmianti

NIM : 18913009

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 21 Februari 2020

Pembimbing,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Dr. Anton Priyo Nugroho SE., MM.

PERSEMBAHAN

KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

“Kedua pahlawan dan motivasi terbesar dalam hidupku, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Nur Laila yang senantiasa berjuang untuk kesuksesan dan kebahagiaan putra-putrinya, Kakanda Yanuardi Wicaksono yang selalu bersedia direpotkan”

“Sahabat dan orang-orang terdekhatku, yang selalu memberikan dukungan dan doa.”



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَعَاثِبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹

Qs. al-Isra ayat 26



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 284.

**PENDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai pada penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	Komater balik keatas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamza h	<i>'</i>	Apostrof

ي	yā'	Y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faḥḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faḥḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Desi Rahmianti
NIM. 18913009

Masalah besar yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat tiga tertinggi setelah Papua Barat dan Papua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan TPT terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait PDRB per kapita, IPM, jumlah penduduk, dan TPT pada 21 Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018. Metode analisis data yang digunakan yaitu PVECM (*Panel Vector Error Correction Model*) untuk mengestimasi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, IPM dalam jangka panjang berpengaruh negatif signifikan dan jangka pendek berpengaruh positif tidak signifikan, jumlah penduduk dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan, TPT dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan jangka pendek berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian secara bersama variabel PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan TPT baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas F-statistik jangka panjang sebesar 0,000000 dan jangka pendek sebesar 0,001108.

Kata kunci: *Kemiskinan, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

The Determinants of Poverty Rate in Regencies/Cities in East Nusa Tenggara Province in the Period of 2011-2018 in Islamic Economy Perspective

Desi Rehmianti
NIM. 18913009

Poverty or the number of people living under the poverty line is a big issue being faced by most of developing countries including Indonesia. Poverty refers to a condition in which someone is not capable of fulfilling the primary needs. The percentage of population in East Nusa Tenggara is in the third highest rank after West Papua and Papua. The aim of this study is to observe the impacts of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), population rate and Open Unemployment Rate on the poverty in regencies/cities in East Nusa Tenggara in 2011-2018 in the Islamic economic perspective.

This is a quantitative research in which it used the sample in the form of secondary data related to GRDP per capita, HDI, population rate, and Open Unemployment Rate in 21 regencies/cities in East Nusa Tenggara in the period of 2011-2018. The data analysis method used was PVECM (*Panel Vector Error Correction Model*) to estimate the long-term and short-term impacts between the independent and dependent variables.

The results of this study showed that GRDP in the short-term and long-term had a negative impact on the poverty. Meanwhile, HDI significantly had long-term negative impact and insignificant short-term positive impact and the population rate in both short-term and long term brought a significantly positive impact. Furthermore, Open Unemployment Rate in the long term brought a negative impact and in the short term it brought positive impact on poverty. Then, simultaneously, variables GRDP, HDI, population rate and Open Unemployment Rate both in a long term and in a short term brought a positive impact on the poverty with the long term probability values of statistic F of 0,000000 and the one in the short term of 0,001108.

Keywords: Poverty, GRDP, HDI, Population Rate, Islamic Economic

February 27, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274-540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, penguasa alam semesta dan segala kehidupan yang diberikannya, atas berkat rahmat Allah serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.”** yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini, masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan serta doa yang tiada hentinya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukhamom, MA, selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho SE., MM selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang begitu bermanfaat selama penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu setulus hati selama perkuliahan, semoga diberi keberkahan oleh Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan, khususnya pada bagian Tata Usaha dan Perpusakaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Nur Laila, saudaraku, Sakinah, Naim, Sultan yang tulus dan tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan dan bimbingannya.
9. Sahabat-sahabat terdekatku, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik.
10. Dan seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran proses penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam kedepannya. Amin.

Yogyakarta, 21 Februari 2020



Desi Rahmianti

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori	18

1. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	18
2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	23
3. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam	27
4. Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam	31
5. Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
C. Hipotesis Penelitian.....	37

BAB III. METODE PENELITIAN 43

A. Paradigma Penelitian	43
B. Definisi Operasional Variabel	45
C. Sumber dan Jenis Data	48
D. Populasi dan Sampel	48
E. Metode Analisis Data.....	49
1. Uji Stasioner	51
2. Uji Kointegrasi	52
3. Analisis PVECM.....	53
a. <i>Impulse Respon Function</i> (IRF)	53
b. <i>Forecast Error Variance Decomposition</i> (FEVDs)	53

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 55

A. Gambaran Umum Provinsi NTT.....	55
1. Kemiskinan	55
2. PDRB	57
3. Indeks Pembangunan Manusia	59
4. Jumlah Penduduk	62
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	63
B. Deskripsi Data Penelitian	64
C. Hasil Uji Prasyarat Analisis	67
1. Uji Akar Unit (<i>Unit Root Test</i>)	67
2. Uji Kointegrasi	68
D. Hasil Uji Hipotesis	69
1. Jangka Panjang	70
a. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan	71
b. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan	72
c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan	72
d. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan	73
2. Jangka Pendek.....	73
a. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan	75
b. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan	75

c.	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan	76
d.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan	76
3.	<i>Impule Respon Function</i> (IRF)	77
4.	<i>Varian Decomposition</i>	78
E.	Pembahasan	79
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	79
2.	Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	84
3.	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	87
4.	Pengaruh TPT terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	90
BAB V. PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti, 9
- Tabel 2: Daftar Komoditi Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) Tahun 2018, 57
- Tabel 3: Hasil Uji Deskriptif, 65
- Tabel 4: Hasil Uji Akar Unit (*unit root test*), 68
- Tabel 5: Hasil Uji *Kao Residual Cointegration*, 69
- Tabel 6: Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang, 70
- Tabel 7: Estimasi Model ECM Jangka Pendek, 73
- Tabel 8: Respon Kemiskinan Terhadap *Shock* Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 77
- Tabel 9: Hasil Analisis *Varian Decomposition*, 78



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2018, 2
- Gambar 2: Grafik Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018, 3
- Gambar 3: Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018, 4
- Gambar 4: Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018, 4
- Gambar 5: Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018, 5
- Gambar 6: Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, 20
- Gambar 7: Kerangka Pemikiran Penelitian, 37



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I: Hasil Uji Deskriptif, 100
Lampiran II: Hasil Uji Akar Unit (*unit root test*), 100
Lampiran III: Hasil Uji *Kao Residual Cointegration*, 114
Lampiran VI: Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang, 114
Lampiran V: Estimasi Model ECM Jangka Pendek, 115
Lampiran IV: Respon Kemiskinan Terhadap *Shock* Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 115
Lampiran VII: Hasil Analisis *Varian Decomposition*, 116
Lampiran VIII: Data Penelitian, 117
Lampiran IX: Surat keterangan cek plagiasi, 122
Lampiran X: Daftar Riwayat Hidup, 123



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks, negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun cukup besar rakyatnya yang tergolong miskin.¹

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan harus diupayakan penyelesaiannya, karena jika tidak mampu diselesaikan, maka akan jadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardawi menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak dibenarkan seseorang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun *ahl al-zimma* (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketentraman masyarakat.²

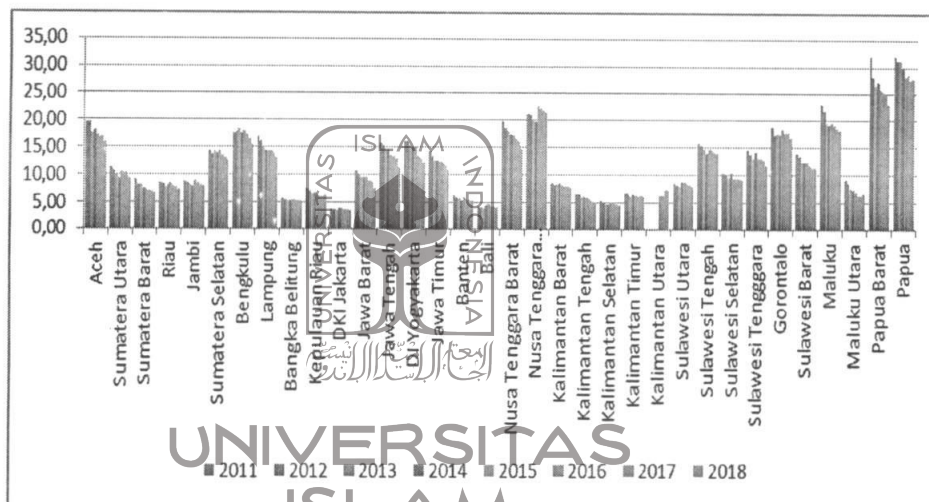
Berdasarkan isi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan langkah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan

¹M. Alhudori, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, *Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No. 1 (September 2017), hlm. 117.

²Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8 No. 2 2017, hlm. 170.

manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).³

Dengan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan, angka kemiskinan Indonesia berhasil diturunkan menjadi 9,82 persen pada bulan Maret dan 9,66 persen pada September 2018. Namun di beberapa provinsi angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu di atas 15 persen pada Maret 2018, seperti di Provinsi Papua (27,74 persen), Papua Barat (23,01 persen), Nusa Tenggara Timur/ NTT (21,35 persen), Maluku (18,12 persen), Gorontalo (16,81 persen), Aceh (15,97 persen) dan Bengkulu (15,43 persen). Berikut grafik persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2018:



Gambar 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2018.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

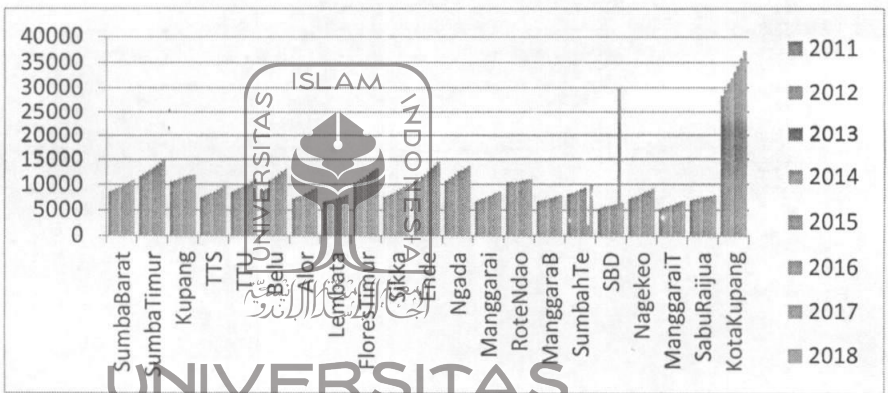
Secara garis besar, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2018 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan seperti yang terlihat pada gambar 1. Permasalahan strategis pada pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak jauh berbeda dengan permasalahan pada tingkat nasional yakni masih tingginya angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat tiga tertinggi di Indonesia setelah Papua Barat dan Papua.

Penelitian yang dilakukan oleh Yostan (2017) mengenai faktor kemiskinan di Nusa Tenggara Timur belum dibahas secara mendetail dan metode analisis yang dilakukan juga belum jelas. Kemudian Frederic (2018) juga

³M. Alhudori, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran..., hlm. 116

melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tetapi hanya satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang terkait dengan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur belum banyak diteliti secara merinci, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode analisis yang lebih tepat.

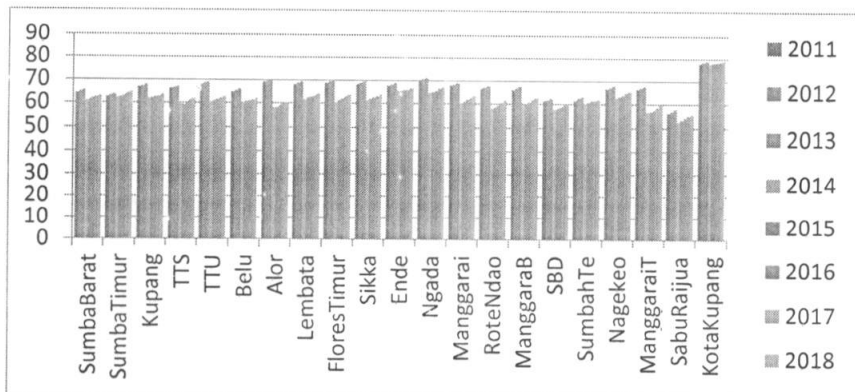
Kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011-2018 mengalami penurunan. Namun demikian persentase tersebut masih berada di atas 20 persen atau berada di atas nasional sebesar 10,12 persen, sehingga masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih perlu mendapat perhatian.



Gambar 2 Grafik Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPRENAS, 2019.

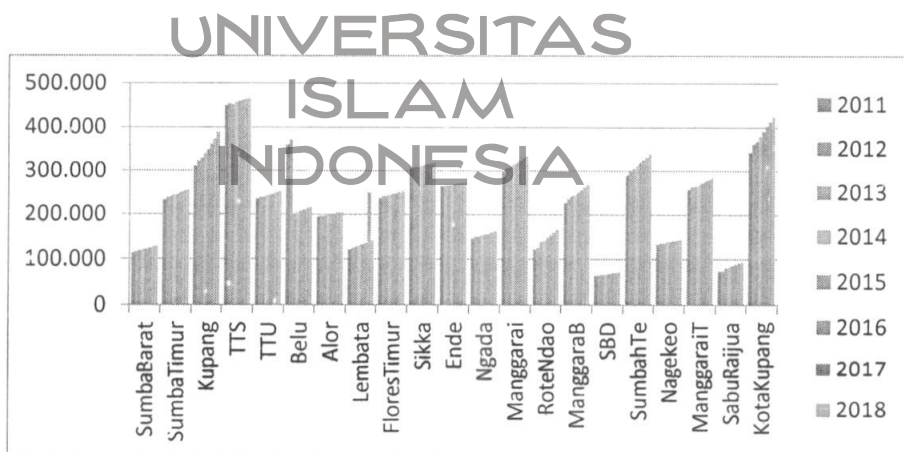
Gambar 2 menunjukkan PDRB di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.⁴

⁴Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 177.



Gambar 3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

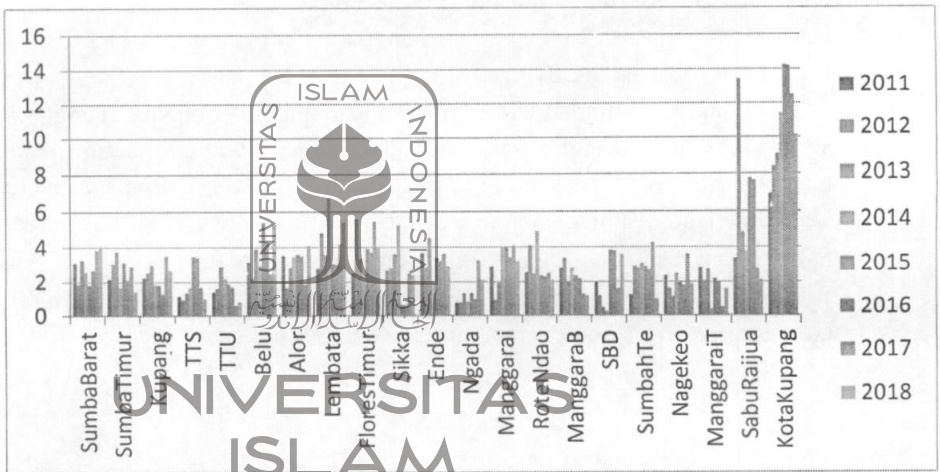
Gambar 3 menunjukkan IPM di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mengalami peningkatan tiap tahunnya namun peningkatan tersebut tidak terjadi secara signifikan. Salah satu strategi/upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.⁵



Gambar 4 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

⁵Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 16.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Masalah kependudukan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Pertumbuhan penduduk, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan.⁶



Gambar 5 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang salah satunya Indonesia. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah bagi suatu perekonomian. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang

⁶Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 337.

percuma dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Secara teori jika masyarakat menganggur berarti tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, karena tidak adanya penghasilan yang dimiliki sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan.⁷

Faktor-faktor pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan pemerintah. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan di setiap daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Determinan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 dalam perspektif ekonomi Islam?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 dalam perspektif ekonomi Islam?
5. Apakah PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷Windra, Pan Budi Marwoto, Yudi Rafani, Analisis Pengaruh Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, Vol 14 No. 2 (November 2016), hlm. 19.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

- a. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - e. Menganalisis pengaruh PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersamaan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran teoritik maupun konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai faktor-faktor dan cara penanggulangan kemiskinan.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tambahan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membuat kebijakan baru dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan.

D. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika penyusunannya terdiri dari V bab, yang masing-masing bab akan dijelaskan secara garis besar, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan; menjelaskan secara umum latar belakang masalah dari kasus yang akan diteliti, isu-isu yang dimunculkan terkait tingkat kemiskinan, menampilkan data tentang PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka.

Bab II merupakan bagian landasan teori. Bagian landasan teori ini memuat telaah pustaka yang berisi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait kemiskinan serta perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dibahas juga kerangka teoritik yang berisi teori-teori tentang kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi perspektif ekonomi Islam, pembangunan manusia

perspektif ekonomi Islam, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Pada bab kedua ini dibahas pula mengenai hipotesis penelitian.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan meliputi uraian terkait jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV merupakan bagian pembahasan. Bagian pembahasan menguraikan atau mendeskripsikan hasil-hasil analisis dari beberapa pengujian yang telah ditentukan serta menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil analisis (diterima atau tidaknya suatu hipotesis).

Bab V merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan akhir penelitian yang menghasilkan pengaruh PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perspektif ekonomi Islam, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang terkait hasil penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dibawah ini yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti menelusuri lebih dalam lagi mengenai tema yang diteliti melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penulis melakukan kajian literatur awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti, untuk mendapatkan konsep, teori, maupun model-model lainnya yang dielaborasi ke dalam penelitian sebagai penyempurna. Berikut tabel kajian penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti

No	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Problem Akademik	Kerangka Teori	Metode Analisis	Hasil
1	Ni Komang Meriyanti (2015) Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh program IPM terhadap pengentasan kemiskinan	Penelitian ini menggunakan teori IPM dan kemiskinan	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan korelasi <i>product moment</i>	Program IPM berada pada kategori sangat baik sedangkan pengentasan kemiskinan berada pada kategori baik. Sedangkan keeratan hubungan antara program IPM terhadap pengentasan kemiskinan tergolong sedang.

2	Lavenia (2016) dalam jurnal yang berjudul "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam Tahun 2005-2014)	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan	Penelitian ini menggunakan teori belanja modal, IPM dan kemiskinan	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) dengan model regresi linear berganda.	Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan dan signifikan. Kemudian, indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
3	Windra, Pan Budi Marwoto, Yudi Rafani (2016) Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia	Teori yang digunakan yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
4	Nurul Fadlillah, Sukiman, Agustin Susyatna Dewi (2016)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel	Penelitian ini menggunakan teori pendapatan perkapita,	Penelitian ini menggunakan metode survei dan merupakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita,

	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Penganggura, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013</p>	<p>pendapatan per kapita, variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk miskin</p> <p>populasi di Jawa Tengah</p>	<p>pengangguran, IPM, penduduk dan kemiskinan</p>	<p>penelitian deskriptif, alat analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dan uji elastisitas regresi data panel</p>	<p>pengangguran, IPM, dan penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan.</p>
5	<p>Siti Badriyah (2016) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB Jawa Tengah</p> <p>Menggunakan <i>Panel Vector Error Correction Model</i> (PVECM)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh alokasi belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu APBD dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Panel Vector Error Correction Model</i> (PVECM)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
6	<p>Firman & Uswatul (2016)</p>	<p>Penelitian ini digunakan untuk</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Dalam pengentasan kemiskinan,</p>

	Kemiskinan dan Pengentasannya dalam Pandangan Islam	mengetahui pengentasan kemiskinan dalam Islam	n teori kemiskinan dalam perspektif Islam	an metode analisis kualitatif deskriptif	Islam mempunyai cara yang variatif, seperti enam cara ditawarkan oleh Yusuf Qordhawi yaitu dengan bekerja, jaminan sanak keluarga, zakat, jaminan baitul maal, kewajiban diluar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.
7	Dwi Puspa Hambarsari, Kunto Inggi (2016) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, penduduk, inflasi, dan kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

8	Noor (2017) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan	Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan uji regresi	Terdapat pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
9	Syaiful Ilmi (2017) Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam	Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan dalam perspektif Islam	Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif	Kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi bagi yang bersangkutan, oleh sebab itu, membangun kesadaran bersama, baik personal maupun pemerintah adalah hal yang niscaya. Namun demikian, ikhtiyar dan etos kerja menjadi modal utama untuk melawan

					kemiskinan tersebut.
10	Novri Silastri (2017) Pengaruh Jumlah penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singi	Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singi	Penelitian ini menggunakan teori penduduk, PDRB, dan kemiskinan	Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi bifilar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singi
11	Noor Zuhdiyaty & David Kaluge (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu lima tahunan 2011-2015	Teori yang digunakan yaitu pembangunan ekonomi terkait kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
12	Novita Dewi (2017) Pengaruh Kemiskinan dan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh	Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan,	Metode analisis data yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan

	<p>Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau</p>	<p>pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau</p>	<p>pertumbuhan ekonomi dan IPM</p>	<p>penelitian ini adalah kuantitatif metode dengan analisis data dan analisis regresi linier menggunakan SPSS</p>	<p>dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM.</p>
13	<p>M. Alhudori (2017) Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, PDRB dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan kemiskinan.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM, PDRB, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan.</p>
14	<p>Abdullahil Mamun, Mohammad Rahim Uddin, Mohammad Tauhidul Islam (2017) <i>An Integrated Approach to Islamic Microfinance for Poverty Alleviation in Bangladesh</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sektor keuangan mikro Islam terhadap penanganan tingkat kemiskinan di Bangladesh</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan dan keuangan mikro Islam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan kajian pustaka</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan di Bangladesh membutuhkan peran lembaga keuangan mikro berbasis Islam</p>
15	<p>Herman (2018)</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini</p>	<p>Penelitian ini</p>	<p>Metode analisis</p>	<p>Hasil penelitian</p>

	<p>Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru</p>	<p>adalah untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kota Pekanbaru baik secara parsial maupun bersama-sama.</p>	<p>mnggunakan teori pendidikan, penduduk, dan kemiskinan</p>	<p>menggunakan teknik analisis regresi berganda</p>	<p>menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin di Kota Pekanbaru. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin di Kota Pekanbaru sedangkan secara simultan variabel tingkat pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin di Kota Pekanbaru.</p>
16	<p>Elda Wahyu Azizah, Sudarti, Hendra Kusuma</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori pendidikan,</p>	<p>Metode alat analisis data yang digunakan dalam</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>

	<p>(2018) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>bagaimana Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>pendapatan perkapita, penduduk dan kemiskinan</p>	<p>penelitian ini adalah analisis regresi data panel</p>	<p>Pendidikan dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap krmiskinan.</p>
17	<p>Asad Zaman (2018) <i>An Islamic Approach to Inequality and Poverty</i></p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penyebab kemiskinan dan penyelesaiannya berdasarkan dimensi spiritual, sosial dan lembaga institusi yang berkecimpung di dalamnya</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan dalam perspektif Islam, social dan spiritual</p>	<p>Metode penilitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Islam</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan masalah kemiskinan membutuhkan aspek spiritual dan sosial.</p>
18	<p>Frederic & Emilia (2018) Analisis Faktor-Faktor</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis</p>	<p>Teoti yang digunakan adalah kemiskinan,</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jam</p>

yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timur Tengah Utara	factor yang mempengaruhi kemiskinan di Kab. TTU	jam kerja, pendidikan, usia, dan jumlah tanggungan keluarga	kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda	kerja, pendidikan, usia, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kab.TTU
---	---	---	--	--

Sumber: Diolah, 2019.

Dari uraian di atas mengenai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian di atas. Sejauh ini yang penulis ketahui, telah banyak pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Namun belum ada penelitian khusus yang meneliti pengaruh PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dengan menggunakan obyek Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dengan perspektif ekonomi Islam. Kemudian perbedaannya juga terdapat pada analisis data yang digunakan, pada penelitian terdahulu hampir seluruhnya menggunakan analisis data panel (*Panel Least Square*) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis PVECM (*Panel Vector Error Correction Model*).

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengaruh PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018, serta kajiannya dalam perspektif Islam, dengan menggunakan variabel PDRB, IPM, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi *Panel Error Vector Correction Model* (PVECM). Penelitian ini dianggap penting untuk dikaji karena belum banyak yang membahas secara khusus mengenai PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan menggunakan analisis PVECM.

B. Landasan Teori

1. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan

meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.¹

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar hidup minimum. Kemiskinan dapat disebabkan karena adanya kelangkaan pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.² Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sudah sangat global.

Tinggi rendahnya kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun pendapatan nasional perkapita suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di suatu negara tersebut pasti akan memburuk.³

Ada tiga penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.⁴

Penyebab kemiskinan bermula dari teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan

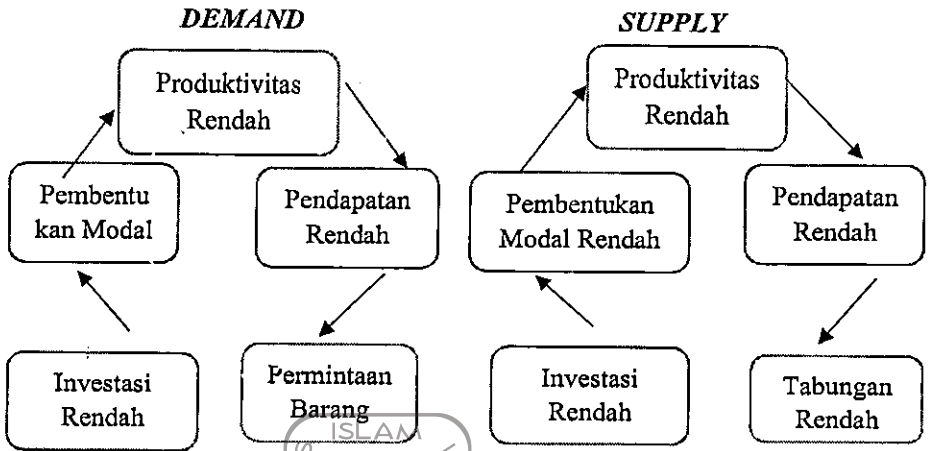
¹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 293.

²Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 123.

³Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 246.

⁴Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 70.

yang diterima.⁵ Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



Gambar 6 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan. Sumber: Nurkse dalam Kuncoro, 2010.

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan: "Negara miskin itu miskin karena dia miskin" (*A poor country is poor because it is poor*), karena memiliki produktivitas yang rendah.

Rendahnya produktivitas akan menghasilkan penghasilan masyarakat kekurangan modal, produktivitas rendah, investasi rendah, tabungan rendah dan pendapatan yang rendah pula, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat. Rendahnya tabungan maka investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal.

Berdasarkan cara pandang dan penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:⁶

⁵*Ibid.*

⁶Suryawati C, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 124.

- 1) Kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain: (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan; (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi; (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya; (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas; (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar; (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.⁷

Al-Qur'an telah menyinggung tentang kemiskinan jauh berabad-abad yang lalu sebagai bagian dari upaya bangkitnya masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Pada zaman jahiliyah kemiskinan dianggap sebagai sebagai sebuah bencana, sehingga bagi mereka yang berada di garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai budak belaka. Bahkan tak sedikit masyarakat jahiliyah yang sampai hati mengubur buah hatinya karena dihantui dengan kemiskinan.

⁷Tjokroaminoto Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hlm. 98.

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang faqir (miskin), salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيحَتَهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Al-Ghazali dalam mendefenisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin.⁸

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan semakin merajalela, maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama.⁹

Kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat dan dalam Al Qur'an sendiri disebutkan kata “*miskin*” sebanyak 11 kali dan “*masākin*” sebanyak 12 kali.¹⁰ Kemiskinan digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi ajaran Islam sendiri menunjukkan bahwa Islam telah memberikan berbagai macam cara antisipatif untuk menghindari terjadinya kemiskinan. Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya.

⁸Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 23.

⁹*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁰Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, *Pembangunan Kota Berkelanjutan*, (Bandung: Penerbit ITB Campbell, 2007), hlm. 285.

Dalam Islam kekayaan itu satu kenikmatan sebagai karunia Allah yang harus disyukuri. Kemiskinan itu suatu cobaan, suatu bencana, yang hanya pertolongan Allah-lah dia dapat dihindari. Karena itu Islam telah memberikan beberapa jalan untuk mengatasinya.¹¹ Allah SWT telah memberi kekayaan kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad), yang semula dalam keadaan miskin menjadi kaya, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Q.S. Adh-Dhuha [93]: 8:

وَرَجَدَكَ غَيًّا فَاغْنَى

Artinya: “Dan Dia (Allah) mendapati engkau (Muhammad) sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”.

Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro-poor budgeting*). Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*).¹²

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹³

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, kemampuan ini dapat tumbuh akibat adanya kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu *Pertama* pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya terus-menerus persediaan barang, *kedua* teknologi yang merupakan tolak ukur derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka macam barang kepada

¹¹Syekh Muhammad Yusuf Al-Qhardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1996), hlm. 11.

¹²Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 11.

¹³Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

penduduk, dan *ketiga* penggunaan teknologi secara efisien memerlukan penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi segingga dapat terciptanya inovasi yang dihasilkan dan dapat dimanfaatkan secara tepat.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.¹⁵ Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor produksi menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut BPS produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.¹⁶

Untuk menghitung PDRB dapat diperoleh menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Di bawah ini penjelasan secara rinci:¹⁷

a) Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha atau sektor yaitu: pertanian dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

b) Pendekatan Pengeluaran

¹⁴M. L. Jhinghan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 57.

¹⁵Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 229.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 230.

¹⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari (a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan inventori dan (e) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

c) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung *netto* (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam merupakan suatu proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman dan kenyamanan hidup.¹⁸ Secara garis besar pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam bersifat multidimensional dan komperhensif. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan material dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus ditekankan pada aspek keseimbangan dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penekanan utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut syariat terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus diikuti dengan distribusi yang merata berdasarkan prinsip keadilan.¹⁹ Selain itu pembangunan ekonomi menurut Islam harus memprioritaskan beberapa tujuan penting seperti stabilitas ekonomi, keadilan distributif, pemenuhan tenaga kerja, dan kepedulian terhadap alam.

Pemahaman tentang konsep pembangunan ekonomi Islam terdapat pada Q.S, al-Mulk [67]: 15:

¹⁸Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, (2014), hlm. 237.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 251.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban umat manusia untuk menjalankan berbagai usaha dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Segala sesuatu yang terdapat dalam alam semesta ini, tak lain merupakan sumber daya dalam skala global, bukan hasil produksi yang siap pakai. Kecuali sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia secara primer seperti: angin dan air. Yang merupakan salah satu bukti konkrit dari adanya hikmah dan kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya. Yakni dengan menciptakan keduanya, dalam kondisi yang selalu tersedia dan dapat dimanfaatkan secara langsung, dimana saja atau kapan saja.²⁰

Islam tidak menafak konsep objektif apapun yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Tidak terdapat perbedaan antara konsep Islam dan konsep ekonomi konvensional tentang pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam konsep Islam harus menekankan pada aspek keadilan dan tidak bertentangan dengan Syari’at.²¹

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan peningkatan ekonomi semata melainkan terkait kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan semata tetapi lebih kepada distribusi kekayaan yang adil.²² Selain itu pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan *ukhrawi*. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan

²⁰*Ibid.*, hlm. 28

²¹Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 46.

²²M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge, Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insaani Press, 2002), hlm. 24.

kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi.²³

3. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut UNDP pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan adalah penduduk, karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Dalam konsep pembangunan manusia, seharusnya pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukannya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai upaya dari berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, aspek pendidikan, serta aspek kesejahteraan ekonomi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan sendirinya dapat meningkat.

Untuk dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁴

a) Produktivitas

Penduduk diharuskan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan himpunan dari model pembangunan manusia.

b) Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi ataupun sosial. Hambatan yang dapat memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus

²³Irfan Syaqui Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

²⁴Badan Pusat Statistik, *Katalog Statistik Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm. 8.

dihapus, sehingga mereka dapat mendapatkan manfaat yang ada dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif untuk meningkatkan kualitas hidup.

c) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus diperbaharui agar dapat dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya.

d) Pemberdayaan

Penduduk harus dapat berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, serta untuk mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk mengukur besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu Negara yaitu:²⁵

- Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempu seseorang dalam semasa hidupnya. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Besarnya nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen merupakan nilai besaran yang sudah disepakati oleh semua negara di dunia. Pada komponen angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas untuk perhitungan indeks 85 tahun dan tahun terendah 25 tahun. Angka ini didapatkan dari standar UNDP.

- Tingkat Pendidikan

Untuk dapat mengukur pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk untuk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca, menulis huruf latin dan yang lainnya. Proses perhitungan kedua indikator tersebut dapat dilakukan setelah masing-masing indikator diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberikan bobot sepertiga dan angka melek huruf diberikan bobot dua pertiga.

Dalam menghitung indeks pendidikan, ada dua batasan yang dipakai sesuai dengan kesepakatan beberapa negara. Untuk angka melek huruf batas maksimumnya adalah 100 dan minimumnya adalah 0. Semakin mendekati

²⁵Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 30.

angka 100 maka menunjukkan banyaknya masyarakat yang mampu untuk membaca dan menulis. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batasan minimumnya adalah 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun menjelaskan bahwa tingkat pendidikan setara dengan lulusan sekolah menengah keatas (SMA).

- Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari perekonomian yang baik. UNDP (*United Nation Development Programme*) mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS (Badan Pusat Statistik) mengukur standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil perkapita.

Aspek pembangunan manusia salah satunya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan tolak ukur pembangunan. Nilai IPM suatu wilayah dapat menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya, seperti pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang sudah mencapai standar layak. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat diperlukan untuk penduduk serta pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan penduduk untuk mencapai kesejahteraan.

Ekonomi Islam memberikan sebuah konsep teori dalam ilmu pembangunan, yaitu konsep Ekonomi Pembangunan Syariah. Pada pendekatan konsep ini bahwa suatu pembangunan sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa.²⁶ Pembangunan manusia merupakan modal awal bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus diarahkan dengan baik, supaya menghasilkan tujuan yang diinginkan. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya, jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sebaliknya, sebuah negeri yang miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan yang memadai, akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan negeri yang kaya akan sumber daya alam.²⁷

²⁶Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 15.

²⁷*Ibid.*, hlm. 6.

Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran suatu negeri. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai objek ataupun subjek dalam pembangunan. Sebagai objek pembangunan, sumber daya manusia berperan sebagai sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.²⁸

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari pembangunan yaitu dengan distribusi pendapatan yang merata. Sejalan dengan hal ini, dasar tujuan Islam yang ingin mensejahterakan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat tercapai jika kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial maupun ekonomi. Islam berusaha untuk mewujudkan keadilan dalam hal distribusi kekayaan.²⁹

Pilar pembangunan manusia dalam Islam adalah *istishlah* atau kebaikan/kemaslahatan bagi manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan dimuka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memperhatikan aspek kemaslahatan. Semua kebijakan terhadap pembangunan manusia membawa kebaikan bagi kualitas hidup manusia maka hal tersebut baik untuk dilakukan dan berhak mendapatkan pahala karena telah menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah SWT sedangkan sebaliknya jika kebijakan yang dibuat dapat merusak kualitas hidup manusia maka hal tersebut haram dari sisi aturan dan dosa jika tetap dilakukan.³⁰

Pada akhirnya, pembangunan kualitas manusia dengan menitikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas berilmu dan berkemajuan dan memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. Sehingga Islam hadir pada setiap pola pikir masyarakat, pada setiap pengambilan keputusan, serta pada segenap lini kehidupan di masyarakat. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah terciptanya lingkungan serta kehidupan sosial-masyarakat yang baik dan beradab.³¹

²⁸Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 177.

²⁹*Ibid.*

³⁰As'ad Bukhari, Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi, *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 No. 1 (Juni 2018), hlm. 5.

³¹*Ibid.*

4. Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.³²

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing return*). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.³³

Menurut Maier di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:³⁴

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya

³²R Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan sosial, 2012), hlm. 136.

³³Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPP STIE YKPN, 2004), hlm. 223.

³⁴Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hlm. 17.

- perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
 - 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB (Negara sedang berkembang) membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.³⁵

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.³⁶

Sedangkan Todaro menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.³⁷ Dengan kata lain, semakin banyak angkatan

³⁵*Ibid.*, hlm. 18.

³⁶*Ibid.*

³⁷Michael P. Todaro & Stephen C. S, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 244.

kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Dengan banyaknya penduduk yang berproduktifitas serta adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, diharapkan menjadi modal dalam memperlancar pembangunan suatu daerah yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Peningkatan pembangunan suatu daerah diharapkan terjadi secara adil dan merata sehingga memperkecil ketimpangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لِّئِنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memperoleh hasil dari apa yang telah diusahakannya. Untuk itu produktifitas seseorang sangat penting karena berdampak pada hasil/output yang akan diperolehnya.

Al-Qur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Balad: 4 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah”.

Kata *kabad*, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan, dan kesulitan akibat bekerja keras. Hal tersebut merupakan cobaan bagi manusia yakni ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan kerja keras. Selain itu penggunaan kata *kabad* menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan perjuangan untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu manusia diwajibkan berjuang dan bersusah payah untuk mencapai kejayaan

di dunia, manusia dijadikan kuat dari segi fisik untuk menanggulangi kesulitan hidup.³⁸

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan produktif, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal/kerja.³⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Allah tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Allah akan berikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.

5. Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Sukirno pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di

³⁸Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 228.

³⁹*Ibid.*, hlm. 229.

era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.⁴⁰

Pada zaman sekarang ini usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Menurut Sukirno, pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:⁴¹

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;
- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

⁴⁰Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 328-331.

Menganggur dalam Islam bukanlah suatu yang dianjurkan, tetapi bekerja dalam Islam adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan. Menurut Imam Syaibani: “kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia”.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

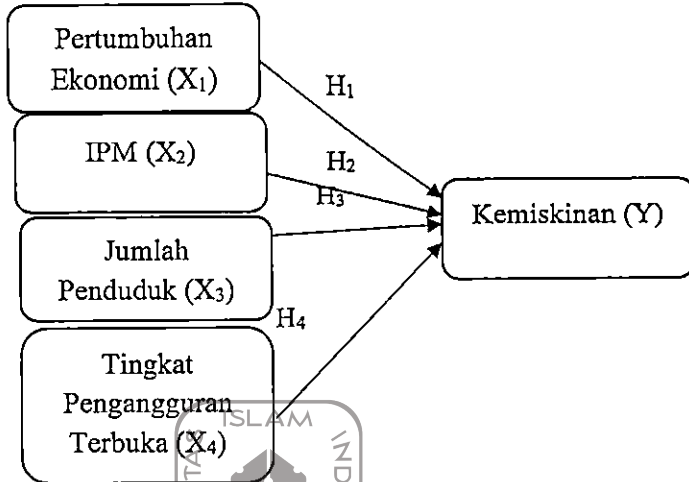
Menurut Yusuf Qardawi pengangguran dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴²

- 1) Pengangguran *jabariyyah* (terpaksa), yaitu suatu pengangguran yang seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi, karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun.
- 2) Pengangguran *khiyariyyah*, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan, sehingga menjadi beban bagi orang lain. Memilih menganggur dengan potensi yang ada daripada harus bekerja.

Dengan merujuk pada telaah pustaka dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan, maka secara skematis untuk penelitian ini telah dapat dirancang pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB), IPM, persentase penduduk, dan

⁴²Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Zikrul Hakim: Jakarta), hlm. 6.

tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7 Kerangka Pemikiran Penelitian. Sumber: Diolah, 2019.

Gambar 7 merupakan kerangka pemikiran penelitian yang digunakan sebagai gambaran secara umum tentang mekanisme penelitian. Dimana, pada tahap pertama memetakan tentang kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahap kedua yaitu memasukkan variabel-variabel independen diantaranya pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka kemudian diuji menggunakan analisis data panel. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi dianalisis menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010, IPM menggunakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah dalam satuan persen yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi NTT, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen.

Tahap ketiga yaitu tahap terakhir dari penelitian yang menghasilkan output berupa hasil perhitungan dari tahap ketiga disertai dengan uraian argumentasi penelitian.

C. Hipotesis Penelitian

1. PDRB dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka

statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.⁴³

Indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah salah satunya dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dimana pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dapat tepat sasaran maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Bila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga produktifitasnya pun semakin tinggi. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan pun akan turun.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windra, Pan Budi Marwoto, dan Yudi Rafani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Diah Paramita dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Novri Silastri (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singing.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2016. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018.

⁴³Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 250.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018

IPM menggambarkan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia.⁴⁴

Salah satu strategi/upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.⁴⁵

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou (2016) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadlillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Penelitian yang dilakukan oleh Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, dan Richard L.H Tumilaar (2016) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2005-2014.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi (2017) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Riau 2014. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 260.

⁴⁵Subandi, *Ekonomi Pembangunan...*, hlm. 16.

H₂: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018.

3. Jumlah penduduk dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018

Todaro menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.⁴⁶ Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Dengan banyaknya penduduk yang berproduktifitas serta adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novri Silastri (2017) bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan artinya ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, dan sebaliknya ketika jumlah penduduk mengalami penurunan maka akan diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian yang dilakukan oleh Herman (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Riry Isramiwarti, M. Rasuli, dan Taufeni Taufik (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan oleh Elda Wahyu Azizah, Sudarti, dan Hendra Kusuma (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novri Silastri (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap

⁴⁶Michael P. Todaro & Stephen C. S, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 244.

kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singing. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₃: Penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018.

4. Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018

Sukirno menjelaskan bahwa pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.⁴⁷

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sodik Dwi Purnomo (2019) bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan, dan sebaliknya ketika jumlah pengangguran menurun maka akan diikuti oleh penurunan angka kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Windra, Pan Budi Marwoto, dan Yudi Rafani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian yang dilakukan oleh Aria Bhaswara Mohammad

⁴⁷Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28.

Bintang (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aria Bhaswara Mohammad Bintang (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa oengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2014. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.¹ Sedangkan Baker dalam Muslim mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas tersebut agar berhasil.²

Paradigma penelitian dalam hal ini merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.³

Penelitian ini menggunakan paradigma Profetik, yaitu proses pengilmuan ayat-ayat al-Qur'an. Paradigma profetik menggambarkan sebuah proses integrasi keilmuan (*religious science* dan *non religious science*) yang sejatinya telah ada dalam perkembangan keilmuan Islam. Oleh karena itu,

¹Muslim, Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Wahana* Vol. 1, No. 10, (Tahun 2016), hlm. 77-78.

²*Ibid.*

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 42.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara astronomis provinsi NTT terletak antara 8° - 12° lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores.¹

Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tujuh pulau besar, diantaranya; Pulau Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Pulau Timor (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang), Pulau Flores (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur), Pulau Alor (Alor), Pulau Lembata (Lembata), Pulau Rote (Rote Ndao), dan Pulau Sabu (Sabu Raja).²

Luas wilayah daratan $47.931,54 \text{ km}^2$ tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayah NTT bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 km.³

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas $47.931,54 \text{ km}^2$ dengan Pulau Timor sebagai pulau terluas $14.732,35 \text{ km}^2$.⁴

Wilayah administrasi di NTT tahun 2018 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas $5.525,83 \text{ km}^2$ (1,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas $180,27 \text{ km}^2$ (0,38%).⁵

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi kemampuan tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah akan berdampak pada ketidakmampuan

¹BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2019, hlm. 3.

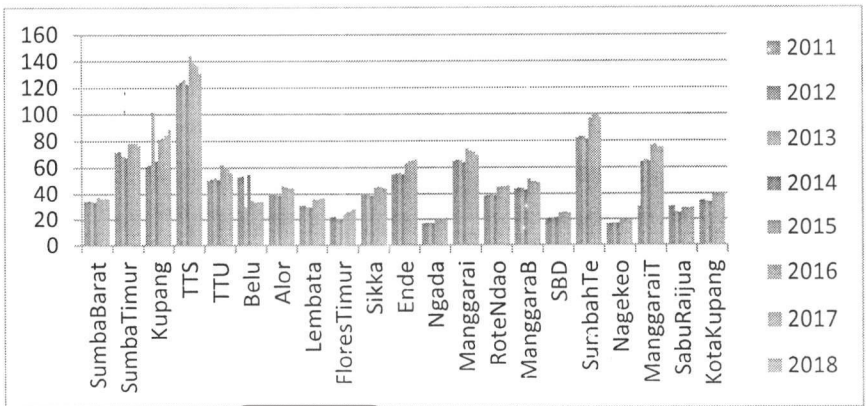
²Ibid.

³Ibid, hlm.4.

⁴Ibid.

⁵Ibid.

untuk memenuhi standar hidup rata-rata. Berikut grafik kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:



Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPPENAS, 2019.

Jumlah penduduk miskin pada kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018 cenderung mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak terjadi di setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di tahun 2018 sebesar 1.142.170 orang naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 1.134.740 ribu orang.⁶ Sedangkan pada tingkat provinsi jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.332.590 orang dan jumlah penduduk miskin terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 50.350 orang.⁷

Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Periode tahun 2017-2018 Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 2,34 persen, yaitu dari Rp346.737 per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp354.898 per kapita per bulan pada tahun 2018. Komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBN), peran komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan dengan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada tahun 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 78.83 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 78.59 persen.⁸

⁶BPS, *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi NTT 2018*, (BPS: 2018), Hlm.

2.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm.3.

Pada tahun 2018 komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama, yaitu: beras, rokok, dan gula pasir. Sedangkan komoditi yang bukan makanan memberikan sumbangan besar adalah perumahan, pendidikan, kayu bakar, perlengkapan mandi, bensin, listrik dan angkutan. Komoditas beras memberikan kontribusi terbesar baik di perkotaan maupun pedesaan dan disusul rokok kretek filter yang memiliki kontribusi terbesar kedua.

Tabel 2 Daftar Komoditi Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%) Tahun 2018

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	31,24	Beras	41,29
Rokok Kretek Filter	8,77	Rokok Kretek Filter	5,33
Gula Pasir	2,49	Gula Pasir	3,48
Kopi Bubuk	2,11	Jagung Pipilan/Beras Jagung	3,38
Roti	2,09	Kopi Bubuk	3,02
Telur Ayam Ras	2,08	Daun Ketela Pohon	2,80
Tongkol/Tuna/Cekalangi	1,99	Daging Babi	1,97
Mie Instan	1,69	Roti	1,73
Daun Ketela Pohon	1,44	Mie Instan	1,62
Bukan Makanan			
Perumahan	10,38	Perumahan	7,14
Pendidikan	2,56	Kayu Bakar	1,75
Bensin	2,12	Pendidikan	1,28
Listrik	2,05	Bensin	1,28
Perlengkapan Mandi	1,33	Perlengkapan Mandi	0,92
Angkutan	1,32	Listrik	0,80
Minyak Tanah	1,30	Angkutan	0,70
Kayu Bakar	1,25	Sabun Cuci	0,55
Air	0,90	Kesehatan	0,49

Sumber: BPS, 2018.

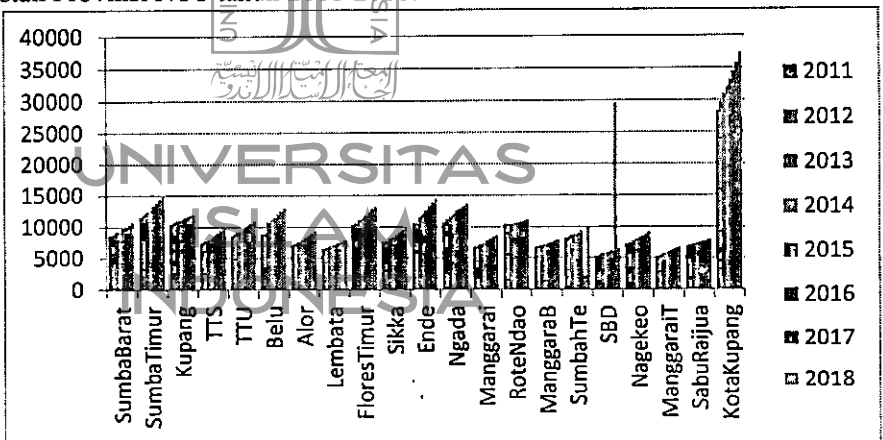
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada periode tertentu. Dalam penyusunan PDRB terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Kedua pendekatan tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen pengeluarannya.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi atas berbagai aktifitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran dari nilai tambah bruto (selisih antara nilai produksi dan biaya dari suatu produk).

Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian NTT pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 12,16 persen.⁹ Berikut grafik PDRB perkapita atas dasar harga konstan Provinsi NTT tahun 2011-2018:



Gambar 9 Grafik PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPPENAS, 2019.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2018 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita terendah di Kab. Sumba Tengah sebesar

⁹BPS, Berita Resmi Statistik: Profil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT 2018, (BPS: 2018), hlm. 2.

Rp2.051.160 pada tahun 2017, kemudian PDRB per kapita tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar Rp37.237.390 pada tahun 2018. Pada tingkat provinsi PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2018 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp165.863.000 sedangkan PDRB per kapita terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp12.276.000.

Perekonomian NTT tahun 2018 tumbuh sebesar 5,13 persen. Secara umum terjadi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2018 terjadi pada lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 12,16 persen, diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 9,57 persen dan transportasi pergudangan sebesar 7,92 persen.¹⁰

Struktur ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,40 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,34 persen dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran; reparasi mobil-sepeda motor sebesar 11,16 persen.¹¹

Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 tumbuh sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 11,22 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 26,97 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 13,76 persen dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran; reparasi mobil-sepeda motor sebesar 11,45 persen.¹²

Dari sisi pengeluaran, komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 11 persen. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,79 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,78 persen.¹³

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu dengan mengukur Indeks Pembangunan Manusia. IPM menjelaskan bagaimana

¹⁰BPS, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018, (BPS: 2018), hlm. 2.

¹¹*Ibid.*, hlm. 3.

¹²*Ibid.*, hlm. 4.

¹³*Ibid.*

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

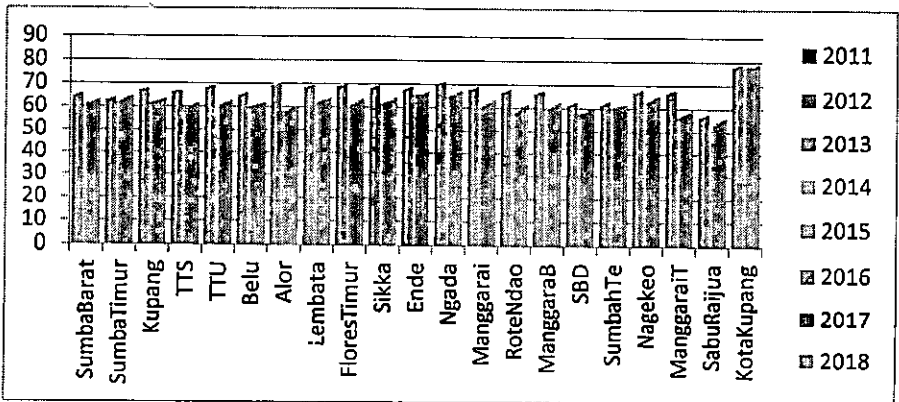
Pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Pengelompokan tersebut yaitu; kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$, kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$, kelompok “sedang” $60 \leq IPM < 70$, dan kelompok “rendah” $IPM < 60$.¹⁴

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang penting untuk diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia NTT terus mengalami kemajuan selama periode 2010-2018, IPM NTT rata-rata tumbuh sebesar 1,05 persen per tahun. Periode tahun 2017-2018 IPM NTT tumbuh 1,04 persen per tahun. Selama periode 2010-2018 IPM NTT menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia NTT mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, pembangunan manusia NTT masih berstatus “rendah”, kemudian selama periode 2011-2018 status pembangunan manusia NTT meningkat menjadi “sedang”.¹⁵

Dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berikut grafik Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018, sebagai berikut:

¹⁴BPS, Berita Resmi Statistik: Profil Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT 2018, (BPS: 2018), hlm. 2.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 3.



Gambar 10 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPPENAS, 2019.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2018 cukup bervariasi. Pada level kabupaten/kota IPM berkisar antara 55,79 persen (Kab. Sabu Raijua) hingga 78,84 persen (Kota Kupang). Pada aspek umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 59,53 tahun (Kab. Sabu Raijua) hingga 68,90 tahun (Kota Kupang). Kemudian pada aspek pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,34 tahun (Kab. Manggarai Timur) hingga 16,08 tahun (Kota Kupang), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,76 tahun (Kab. Sumba Tengah) hingga 11,46 tahun (Kota Kupang). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara Rp5,245,000 per tahun (Kab. Sabu Raijua) hingga Rp13,199,000.

Peningkatan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga dilihat pada perubahan status pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota yang berstatus “rendah” berkurang dari 5 Kabupaten/Kota pada tahun 2017 menjadi 3 Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Kemudian dua kabupaten yang berstatus “rendah” pada tahun 2017 berubah status menjadi “sedang” pada tahun 2018 (Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Alor). Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia yang berstatus “tinggi” hanya Kota Kupang. Sementara itu, hingga tahun 2018, masih terdapat tiga Kabupaten/Kota yang berstatus pembangunan manusia “rendah”, yaitu Kab. Sabu Raijua, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Malaka. Kemudian tahun 2018 IPM Provinsi NTT sebesar 64,39 persen, pada tingkat provinsi IPM tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 persen dan IPM terendah Provinsi Papua sebesar 60,06 persen.¹⁶

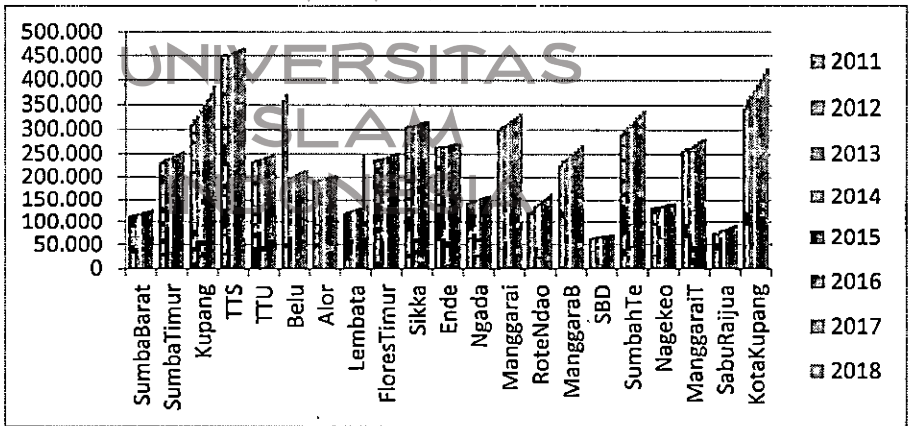
¹⁶*ibid.*, hlm. 4.

Selama periode 2017-2018, seluruh IPM pada Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Tercatat tiga Kabupaten/Kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kab. Manggarai (1,74 persen), Kab. Manggarai Timur (1,67 persen), dan Kab. Rote Ndao (1,65 persen). Kemajuan pembangunan manusia di kabupaten tersebut dipengaruhi oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak.¹⁷

4. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau orang yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga faktor yaitu; fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk dengan tujuan menetap di suatu daerah).

Penduduk Nusa Tenggara Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 penduduk Provinsi NTT sebanyak 5.371.519 orang yang terdiri atas 2.660.613 laki-laki dan 2.710.906 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah 1,67 persen.¹⁸ Berikut grafik jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi NTT tahun 2011-2018:



Gambar 11 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPPENAS, 2019.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2018 jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami

¹⁷Ibid.

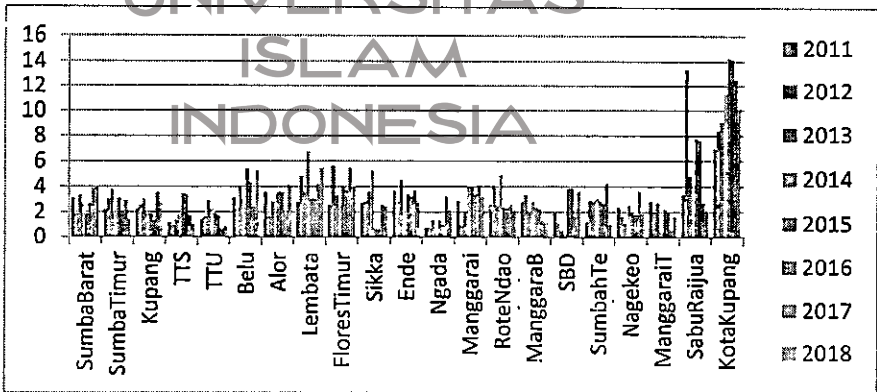
¹⁸BPS, Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2019, (BPS: 2019), hlm. 91.

peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk terendah 63.721 orang pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Tengah, kemudian jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan 465.970 orang pada tahun 2018. Jumlah penduduk Provinsi NTT pada tahun 2018 sebesar 5.371.500 orang kemudian jumlah penduduk tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 48.683.700 orang dan terendah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 716.400 orang.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja (penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun) yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, kemudian mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.¹⁹

Berdasarkan Sakernas 2018, Angkatan kerja berjumlah 2.486.281 orang atau 70,17 persen terhadap penduduk usia kerja, dari jumlah Angkatan kerja tersebut sebanyak 96,99 persen yang berstatus bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT tahun 2018 tercatat sebesar 3,01 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,26 poin dibanding tahun 2017 sebesar 3,27 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.²⁰ Berikut grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018:



Gambar 12 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018. Sumber: BAPPENAS, 2019.

¹⁹BPS, Berita Resmi Statistik: Profil Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2018, (BPS: 2018), hlm. 2.

²⁰*Ibid.*, hlm. 3.

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode tahun 2011-2018 pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan yang fluktuatif. TPT terendah di Kab. Timor Tengah Utara sebesar 0,85 persen, diikuti Kab. Timor Tengah Selatan sebesar 1,01 persen dan Sumba Barat Daya 1,01 persen. Sebaliknya TPT tertinggi yaitu Kota Kupang 10,17 persen, diikuti Lembata 5,40 persen, dan Belu 5,26 persen.

²¹ Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT tahun 2018 sebesar 3,01 persen kemudian pada tingkat provinsi TPT tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 8,52 dan TPT terendah pada Provinsi Bali sebesar 1,37 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2018 mencapai 3,01 persen, turun 0,26 poin dari Agustus 2017 sebesar 3,27 persen. Penganggur di NTT pada Agustus 2018 sebesar 74,7 ribu orang, berkurang 3,8 ribu orang dibanding penganggur Agustus 2017 sebesar 78,5 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT Agustus 2018 sebesar 70,17 persen, naik 1,08 poin dibandingkan TPAK NTT Agustus 2017 yang sebesar 69,09 persen.²²

Angkatan kerja NTT pada Agustus 2018 sebesar 2,49 juta orang, bertambah 87,7 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 sebesar 2,40 juta orang. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2018 mencapai 2,41 juta orang, bertambah 91,5 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2017 sebesar 2,32 juta orang.²³

Distribusi penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 berdasarkan KBLUI 2015 sebagian besar penduduk bekerja di kategori Pertanian sebesar 1,32 juta orang (54,73 persen), diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (9,64 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (8,96 persen). Lapangan usaha yang paling menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian kemudian sektor jasa dan perdagangan. Sebanyak 639.223 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).²⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam kurun waktu 2011-2018.

²¹*Ibid.*, hlm. 4.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Berdasarkan hasil uji statistik dengan analisis deskriptif dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Deskriptif

	Kemiskinan	PDRB	IPM	JP	TPT
Mean	50.07720	10469.96	63.92470	236130.4	3.176905
Median	43.85000	9057.800	62.90000	244599.5	2.795000
Maximum	144.0000	37237.39	78.84000	465970.0	14.25000
Minimum	16.00000	2051.160	52.51000	63721.00	0.250000
Std. Dev	27.58992	5716.601	4.937265	100943.6	2.374158
Skewness	1.246375	3.083283	0.839989	0.232502	2.595891
Kurtosis	4.463231	12.92811	4.381229	2.439733	11.26234

Sumber: Data diolah Eviews 9, 2019.

Variabel kemiskinan pada tabel 4.1 di atas memiliki nilai maksimum sebesar 144,0000 atau 144,000 orang yaitu pada tahun 2015 di Kabupaten Timur Tengah Selatan sedangkan pada tingkat nasional kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kab. Bogor sebesar 415,020 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 16,00000 atau 16,000 orang pada tahun 2011 di Kabupaten Nagekeo dan pada tingkat nasional Kab. Tana Tidung sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah sebesar 1,340 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Kemudian standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 27,58992. Kemudian nilai rata-ratanya sebesar 50,07720 atau 50,077 orang dengan nilai median 43,85000 atau 43,850 orang, karena nilai mean atau rata-ratanya lebih besar dari nilai median ($50,07720 > 43,85000$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel kemiskinan terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 1,246375 karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($1,246375 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 4,463231 karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($4,463231 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Variabel PDRB pada tabel 4.1 di atas memiliki nilai maksimum sebesar 37237,39 atau Rp37.237.390 yaitu pada tahun 2018 di Kota Kupang sedangkan pada tingkat nasional Kab/Kota dengan nilai PDRB tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat sebesar Rp458.885.360 Nilai minimum sebesar 2051.160 atau Rp2.051.160 pada tahun 2017 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab/Kota dengan nilai PDRB terendah yaitu Kab. Pegunungan Arfak sebesar Rp4.429.790 pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Kemudian standar deviasi atau sebaran

datanya sebesar 5716.601. Nilai rata-ratanya sebesar 10469,96 atau Rp10.469.960 dengan nilai median 9057,800 atau Rp9.057.800 karena nilai mean atau rata-ratanya lebih besar dari nilai median ($10469,96 > 9057,800$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel PDRB terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 3,083283 karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($3,083283 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 12,92811 karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($12,92811 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tabel 4.1 di atas memiliki nilai maksimum sebesar 78,84000 atau 79 persen yaitu pada tahun 2018 di Kota Kupang sedangkan tingkat nasional Kab/Kota yang memiliki IPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 86,11 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 52,51000 atau 53 persen pada tahun 2014 di Kabupaten Sabu Raijua dan tingkat nasional Kab. Nduga merupakan daerah yang memiliki tingkat IPM terendah sebesar 29,42 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019), dengan standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 4,937265. Kemudian nilai rata-ratanya sebesar 63,92470 atau 64 persen dengan nilai median 62,90000 atau 63 persen, karena nilai mean atau rata-ratanya lebih besar dari nilai median ($63,92470 > 62,90000$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel IPM terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 0,839989 karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($0,839989 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 4,381229 karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($4,381229 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Variabel Jumlah Penduduk pada tabel 4.1 di atas memiliki nilai maksimum sebesar 465970,0 atau 465,970 orang yaitu pada tahun 2018 di Kabupaten Timur Tengah Selatan sedangkan pada tingkat nasional Kab/Kota dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kab. Bogor sebesar 5,715,000 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 63721,00 atau 63,721 orang pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab/Kota yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kab. Tamberau sebesar 13,785 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019), dengan standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 100943,6. Kemudian nilai rata-ratanya sebesar 236130,4 atau 236,130 orang dengan nilai median 244599,5 atau 244,599 orang, karena nilai mean atau rata-ratanya lebih kecil dari nilai median ($236130,4 < 244599,5$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kiri atau dikatakan bahwa variabel jumlah

penduduk terdistribusi negatif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 0.232502 karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($0.232502 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 2.439733 karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($2.439733 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Kemudian variabel Tingkat Pengangguran Terbuka pada tabel 4.1 di atas memiliki nilai maksimum sebesar 14,25000 atau 14 persen yaitu pada tahun 2015 di Kota Kupang sedangkan pada tahun 2018 Kab/Kota dengan persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu Kab. Serang sebesar 12,77 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 0,250000 atau 0,25 persen pada tahun 2014 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab. Bener Meriah sebagai kabupaten yang memiliki persentase tingkat pengangguran terbuka terendah sebesar 1,07 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019), dengan standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 2,374158. Kemudian nilai rata-ratanya atau mean sebesar 3,176905 atau 3 persen dengan nilai median 2,795000 atau 3 persen, karena nilai mean atau rata-ratanya lebih besar dari nilai median ($3,176905 > 2,795000$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 2,595891 karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($2,595891 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 11,26234 karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($11,26234 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

C. Hasil Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan uji akar unit (*unit root test*) untuk melihat stasioneritas dari masing-masing variabel. Uji stasioneritas dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata varian data konstan sepanjang waktu dan kovarian anatar dua atau lebih data runtun waktu hanya tergantung pada kelambanan anatar dua atau lebih periode waktu tersebut.

Pengujian masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan metode Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron. Jika probabilitas dari ketiga test tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha=5\%$ (0,05), maka data dikatakan stasioner pada setiap variabel dengan derajat level maupun *first different*, begitupula sebaliknya jika probabilitas dari ketiga test tersebut lebih besar dari tingkat $\alpha=5\%$ (0,05) maka data dikatakan tidak stasioner.

Kriteria uji unit root/stasioner data:

- o H_0 : ada *unit root*
 H_a : tidak ada *unit root*
- o Statistik uji: nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron
- o Daerah kritis: H_0 ditolak jika nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $>$ *critical value* ($\alpha=5\%$)
- o Kesimpulan: H_0 diterima jika nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $<$ *critical value* ($\alpha=5\%$)

Adapun uji stasioneritas pada variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Akar Unit (*unit root test*)

Metode	Kemiskinan	D(kemiskinan)	LnPDRB	D(lnPDRB)	IPM	D(IPM)	JP	D(JP)	TPT	D(TPT)
Levin, Lin & Chut	0.9988	0.0000*	10000	0.0000*	-0.4487	0.0000*	0.7734	0.0000*	0.0166*	0.0000*
ADF - Fisher Chi-Square	0.4025	0.0000*	0.9958	0.0000*	0.8705	0.0027*	0.9792	0.0000*	0.3284	0.0037*
PP - Fisher Chi-Square	0.3051	0.0000*	0.5253	0.0000*	0.9489	0.0015*	0.8722	0.0000*	0.8124	0.0000*

Ket*) Signifikan pada taraf uji 5% berdasarkan distribusi *prob. Chi Square*

Sumber: Data diolah eviews 9, 2020.

Hasil uji akar unit atau *unit root test* menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka tidak stasioner pada tingkat level atau H_0 ditolak karena nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $>$ *critical value* ($\alpha=5\%$). Akan tetapi semua variabel tersebut stasioner pada *first different* atau H_0 diterima karena nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $<$ *critical value* ($\alpha=5\%$) dengan taraf nyata $\alpha=5\%$ (0,05) seperti pada tabel 4.2. hal ini berarti salah satu syarat metode PVECM terpenuhi.

2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan setelah uji stasioneritas dan telah berintegrasi dengan derajat yang sama. Uji kointegrasi dilakukan dengan menguji stasioneritas dari residual agar terjadi suatu penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang antar variabel. Penelitian ini dalam melakukan uji kointegrasi menggunakan *Kao Residual Cointegration Test*.

Kriteria uji kointegrasi data sebagai berikut:

- o H_0 : ada kointegrasi

H_0 : tidak ada kointegrasi

- Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha=5\%$
- Statistik uji: nilai ADF
- Daerah kritis: H_0 ditolak jika nilai ADF > *critical value* ($\alpha=5\%$)
- Kesimpulan: H_0 diterima jika nilai ADF < *critical value* ($\alpha=5\%$)

Berikut hasil uji kointegrasi dengan menggunakan uji *Kao Residual Cointegration* sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji *Kao Residual Cointegration*

ADF	t-Statistic	Prob.
	-4.462179	0.0000
Residual variance	49.93603	
HAC variance	25.52051	

Sumber: Data diolah eviews 9, 2020

Hasil uji kointegrasi dengan *Kao Residual Cointegration Test* menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel penelitian dengan *t-statistik* sebesar -4.462179 dan *p-value* sebesar 0,0000 (*p-value* > 0,05) atau H_0 diterima karena nilai ADF < *critical value* ($\alpha=5\%$) sehingga PVECM dipilih sebagai alat estimasi.

D. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Pendekatan ECM digunakan untuk menjelaskan parameter jangka panjang dan jangka pendek. Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka panjang sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = \alpha_1 \text{PDRB}_{it} + \alpha_2 \text{IPM}_{it} + \alpha_3 \text{JP}_{it} + \alpha_4 \text{TPT}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- KEMISKINAN_{it} : Kemiskinan
 PDRB_{it} : Produk Domestik Regional Bruto
 IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia
 JP_{it} : Jumlah Penduduk
 TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka
 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Panjang

Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$\text{DKEMISKINAN}_{it} = \alpha_1 \text{DPDRB}_{it} + \alpha_2 \text{DIPM}_{it} + \alpha_3 \text{DJP}_{it} + \alpha_4 \text{DTPT}_{it} + \text{ECT}(-1)$$

Keterangan:

KEMISKINAN _{it}	: Kemiskinan
PDRB _{it}	: Produk Domestik Regional Bruto
IPM _{it}	: Indeks Pembangunan Manusia
JP _{it}	: Jumlah Penduduk
TPT _{it}	: Tingkat Pengangguran Terbuka
$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Pendek
ECT	: <i>Error Correction Term</i>

Kriteria pengujian *Error Correction Model* (ECM) sebagai berikut:

- o H_0 : Signifikan
- o H_a : Tidak Signifikan
- o Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- o Statistik uji: nilai probabilitas F statistik (F hitung)
- o Daerah kritis: H_0 ditolak jika nilai probabilitas $>$ *critical value* ($\alpha = 5\%$)
- o Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai probabilitas $<$ *critical value* ($\alpha = 5\%$)

1. Pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dengan model ECM jangka panjang, hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRB	-5.622743	3.850026	-1.460443	0.1461
IPM	-1.802331	0.280568	-6.423867	0.0000
JP	0.000241	1.20E-05	20.02411	0.0000
TPT	-1.555441	0.572271	-2.718015	0.0073
C	164.9402	31.36043	5.259502	0.0000
R-squared	0.723324			
Adjusted R-squared	0.716534			
F-statistic	106.5342			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = 164,9402_C - 5,622743_LNPDRB - 1,802331_IPM + 0,000241_JP - 1,555441_TPT$$

Dari persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 164,9402 artinya ketika nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB), IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka = 0, maka besarnya tingkat kemiskinan sebesar 164,9402. Adapun pengukuran menggunakan tingkat

signifikansi 5%, dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa variabel IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka signifikan, sedangkan variabel PDRB tidak signifikan secara statistik.

Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien PDRB sebesar -5,622743, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya PDRB bernilai negatif terhadap kemiskinan. Ketika PDRB naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 5,622743, sebaliknya ketika PDRB turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 5,622743.

Variabel IPM dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar -1,802331, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya IPM bernilai negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 1,802331, sebaliknya ketika IPM turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 1,802331.

Variabel jumlah penduduk nilai koefisien sebesar 0,000241 dimana karena nilai koefisien positif maka pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan adalah positif. Artinya, ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000241, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh menurunnya angka kemiskinan sebesar 0,000241.

Diketahui nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -1,555441 dimana karena nilainya koefisien negatif maka pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan adalah negatif. Artinya, ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,555441, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan sebesar 1,555441.

a. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi jangka panjang di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,1461 atau lebih besar dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil uji tersebut maka H_0 ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,1461 > 0,05$) atau data tidak signifikan secara statistik. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara PDRB

dan kemiskinan bernilai negatif sebesar $-5,622743$ artinya ketika terjadi peningkatan pada PDRB maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada PDRB maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima dan PDRB bisa digunakan sebagai model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 1: PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

b. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi jangka panjang di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas IPM sebesar $0,0000$ atau lebih kecil dari $0,05$. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari $0,05$ maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil uji tersebut maka H_0 diterima karena nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ ($0,0000 > 0,05$) sehingga secara statistik data signifikan. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara IPM dan kemiskinan bernilai negatif sebesar $-1,802331$ artinya ketika terjadi peningkatan pada IPM maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada IPM maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima dan IPM bisa digunakan sebagai model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 2: IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk berdasarkan hasil estimasi jangka panjang mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,0000$ atau lebih kecil dari $0,05$. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini yaitu nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ maka H_0 diterima artinya secara statistik data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari $0,05$ maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan secara statistik. Karena nilai probabilitas $0,0000$ lebih kecil dari $0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data signifikan, yang berarti ada pengaruh antara jumlah penduduk dan kemiskinan. Nilai koefisien diketahui hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan bernilai positif sebesar $0,000241$ artinya ketika terjadi peningkatan pada jumlah penduduk maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada jumlah penduduk maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak, sehingga variabel jumlah penduduk tidak dapat dijadikan model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana

bunyi hipotesis 3: jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

d. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan hasil estimasi jangka panjang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0073 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini yaitu nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya secara statistik data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan secara statistik. Karena nilai probabilitas 0,0073 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data signifikan, yang berarti ada pengaruh antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan bernilai negatif sebesar -1,555441 artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan hipotesis 4 ditolak, sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka tidak dapat dijadikan model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 4: tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Pada hasil estimasi model ECM jangka panjang diketahui nilai Adjusted R-square adalah sebesar 0,716534 yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71,65 persen. Sedangkan sisanya 28,35 persen adalah variabel lain di luar model penelitian. Nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kab/Kota di provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Adapun hasil estimasi model ECM dalam jangka pendek ditunjukkan oleh hasil di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNPDRB)	-0.339325	2.267712	-0.149633	0.8813
D(IPM)	0.195309	0.210229	0.929030	0.3545

D(JP)	0.000101	2.93E-05	3.431372	0.0008
D(TPT)	0.041693	0.314692	0.132490	0.8948
ECT(-1)	-0.134603	0.040181	-3.349943	0.0010
C	0.907044	0.584887	1.550801	0.1232
R-squared	0.132664			
Adjusted R-squared	0.101908			
F-statistic	4.313363			
Prob(F-statistic)	0.001108			

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020.

$$DKEMISKINAN_{it} = 0,907044_C - 0,339325_DLNPDRB + 0,195309_DIPM + 0,000101_DJP + 0,041693_DTPT$$

Dari persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,907044 artinya ketika nilai PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka = 0, maka besarnya tingkat kemiskinan sebesar 0,907044. Adapun pengukuran menggunakan tingkat signifikansi 5%, dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa variabel PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan, sedangkan variabel jumlah penduduk signifikan secara statistik.

Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien PDRB sebesar -0,339325, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya PDRB bernilai negatif terhadap kemiskinan. Ketika PDRB naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 0,339325, sebaliknya ketika PDRB turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,339325.

Variabel IPM dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar 0,195309, di mana ketika nilai koefisien bernilai positif artinya IPM bernilai positif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM naik 1 persen maka akan diikuti pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,195309, sebaliknya ketika IPM turun 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,195309.

Diketahui nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar 0,000101 dimana karena nilainya koefisien positif maka pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan adalah positif. Artinya, ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000101, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1

persen maka akan diikuti oleh menurunnya angka kemiskinan sebesar 0,000101.

Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,041693, di mana ketika nilai koefisien bernilai positif berarti tingkat pengangguran terbuka bernilai positif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika tingkat pengangguran terbuka naik 1 persen maka akan diikuti pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,041693, sebaliknya ketika tingkat pengangguran terbuka turun 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,041693.

a. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi jangka pendek di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,8813 atau lebih besar dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil uji tersebut maka H_0 ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,8813 > 0,05$) atau data tidak signifikan secara statistik. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara PDRB dan kemiskinan bernilai negatif sebesar -0,339325 artinya ketika terjadi peningkatan pada PDRB maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada PDRB maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima dan PDRB bisa digunakan sebagai model jangka pendek dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 1: PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

b. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Variabel IPM dari hasil estimasi jangka pendek di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas IPM sebesar 0,3545 atau lebih besar dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil uji tersebut maka H_0 ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,3545 > 0,05$) sehingga secara statistik data tidak signifikan. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara IPM dan kemiskinan bernilai positif sebesar 0,195309 artinya ketika terjadi peningkatan pada IPM maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada IPM maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan

hipotesis 2 ditolak dan IPM tidak bisa digunakan sebagai model jangka pendek dalam penelitian ini, karena sebagaimana bunyi hipotesis 2: IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk berdasarkan hasil estimasi jangka pendek mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0008 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini yaitu nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya secara statistik data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan secara statistik. Karena nilai probabilitas 0,0008 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data signifikan, yang berarti ada pengaruh antara jumlah penduduk dan kemiskinan. Nilai koefisien diketahui hubungan antara jumlah penduduk dan kemiskinan bernilai positif sebesar 0,000101 artinya ketika terjadi peningkatan pada jumlah penduduk maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada jumlah penduduk maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak, sehingga variabel jumlah penduduk tidak dapat dijadikan model jangka pendek dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 3: jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

d. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Variabel tingkat pengangguran terbuka dari hasil estimasi jangka pendek di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,8948 atau lebih besar dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasarkan pada hasil uji tersebut maka H_0 ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,8948 > 0,05$) sehingga secara statistik data tidak signifikan. Kemudian dari nilai koefisien diketahui hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan bernilai positif sebesar 0,041693 artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima dan tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan sebagai model jangka pendek dalam penelitian ini, karena sebagaimana bunyi

hipotesis 4: tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi jangka pendek di atas diperoleh koefisien variabel ECT (*Error Correction Term*) sebesar $-0,134603$ yang mempunyai makna bahwa perbedaan antara tingkat pertumbuhan dengan nilai 1 tahun. Koefisien ECT digunakan untuk mengukur respon *regressand* setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2009), koefisien ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai ECT sebesar $-0,134603$ dengan probabilitas $0,0010$ yang berarti signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen sehingga model ECM dalam jangka pendek adalah valid atau cukup baik.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar $0,101908$ yang berarti bahwa 10,19 persen variasi variabel kemiskinan secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya sebesar 89,81 persen dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak terdapat dalam model penelitian. Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,001108$ atau lebih kecil dari $0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

1. *Impule Response Function (IRF)*

Impule Response Function (IRF) dilakukan untuk melihat pengaruh *shock* dari suatu variabel terhadap variabel lain. Suatu *shock* pada variabel endogen akan mempengaruhi variabel itu sendiri dan menjalar ke variabel-variabel endogen lainnya. IRF memberikan arah hubungan besarnya pengaruh antar variabel endogen. Estimasi yang dilakukan dalam IRF dititikberatkan pada respon suatu variabel pada perubahan suatu standar deviasi dari variabel itu sendiri maupun dari variabel lainnya yang terdapat dalam model PVECM.

Sumbu horizontal merupakan waktu dalam periode kedepan setelah terjadinya *shock*, sedangkan sumbu vertikal adalah nilai respon. Secara mendasar dalam analisis ini akan diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Adapun grafik dari hasil uji *Impule Response Function* adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Respon Kemiskinan Terhadap *Shock* Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka:

Periode	Kemiskinan	PDRB	IPM	JP	TPT
1	3,769566	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

2	1,285957	-0,348172	-1,771653	-0,555709	0,187030
3	2,193506	2,377247	-0,129470	0,936153	-0,180232
4	1,692353	-1,151774	0,022081	-0,922588	-0,155256
5	2,506944	9,941511	-0,650508	0,967494	0,809094
6	0,996262	-1,641116	0,339463	-0,247618	0,515473
7	3,708699	2,053758	-0,529670	0,904516	-0,467000
8	0,084391	-2,770027	0,386373	-0,987577	0,541522

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020.

Hasil analisis *Impule Response* dilakukan untuk melihat dampak saat ini dan masa depan dari variabel kemiskinan akibat perubahan atau *shock* variabel PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Adanya *shock* pada variabel PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka pada periode tahun pertama tidak memberikan dampak apapun pada tingkat kemiskinan. Pada periode tahun kedua *shock* PDRB memberi dampak negatif sebesar -0,348172 pada tingkat kemiskinan, *shock* IPM memberi dampak negatif sebesar -1,771653, *shock* variabel jumlah penduduk memberi dampak negatif sebesar -0,555709 dan variabel tingkat pengangguran terbuka memberi dampak positif sebesar 0,187030 pada tingkat kemiskinan. Dalam kurun waktu 8 tahun, variabel yang memberikan dampak paling besar terhadap kemiskinan yaitu PDRB sebesar 9,941511 sedangkan variabel IPM sebesar 0,386373, variabel jumlah penduduk sebesar 0,967494, dan variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,809094.

2. *Varian Decomposition*

Analisis *Varian Decomposition* dapat menggambarkan pentingnya peran dari setiap variabel di dalam sistem VAR atau VECM karena adanya *shock*. *Varian Decomposition* berguna untuk memprediksi variabel tertentu di dalam sistem VAR atau VECM. dengan menggunakan analisis *Varian Decomposition* dalam penelitian ini diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Analisis *Varian Decomposition*

Periode	S.E	Kemiskinan	PDRB	IPM	JP	TPT
1	3,769566	100,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
2	4,412152	81,48788	0,622711	16,12339	1,586329	0,179688
3	5,554771	67,00522	18,70827	10,22676	3,841113	0,218644
4	1,293266	14,07373	82,76703	1,886956	1,217529	0,054748
5	1,656460	10,86922	86,47111	1,304427	1,083294	0,271953
6	2,334838	5,652816	92,92738	0,677689	0,556496	0,185622
7	3,133704	4,538711	94,53902	0,404777	0,392243	0,125253
8	4,184185	2,546221	96,85548	0,235571	0,275722	0,087006

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020.

Varian Decomposition tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pada periode tahun pertama *forecast error variance* dari tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan itu sendiri sebesar 100 persen, sedangkan variabel lain tidak berkontribusi. Pada periode tahun kedua yang dapat dijelaskan variabel kemiskinan sendiri sebesar 81,48 persen, PDRB 0,62 persen, IPM sebesar 16,12 persen, jumlah penduduk sebesar 1,58 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,17 persen. Selama periode 8 tahun *forecast error variance* yang dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan sendiri sebesar 2,54 persen, PDRB 96,85 persen, IPM sebesar 0,23 persen, jumlah penduduk sebesar 0,27 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,08 persen. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 8 tahun variabel yang memberikan dampak terbesar adalah variabel PDRB sebesar 96,85 persen dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan variabel IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka kontribusinya cenderung berkurang tiap tahunnya.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan. Artinya, apabila PDRB naik maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PDRB mampu menjadi tolok ukur dalam mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Segono & Akbar Pou (2016) dan Noor Zuhdiyati & David Kaluge (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan pada PDRB per kapita di Provinsi NTT masih sangat rendah, karena itu pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian PDRB per kapita antar kabupaten/ kota di Provinsi NTT sangatlah timpang antar daerah. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp.37.237.390. sedangkan kabupaten dengan PDRB terendah adalah Kab. Sumba Tengah sebesar Rp2.051.160.

NTT merupakan provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita terendah se-Indonesia yaitu sebesar Rp12.276.000 sangat timpang dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp165.863.000. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTT.

Terkait pola pertumbuhan konsumsi di wilayah dengan kemiskinan tinggi dapat dilihat melalui pertumbuhan konsumsi penduduk tiap persentil atau dikenal juga dengan *Growth Incidence Curve* (GIC). Provinsi NTT selama periode tahun 2016-2017 menunjukkan pertumbuhan konsumsi atau pengeluaran kelompok 20 persen terbawah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas, serta berada jauh di bawah rata-rata provinsi. Bahkan, pada kelompok terbawah, GIC bernilai negative, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang jatuh miskin pada periode tersebut. Data tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi hampir merata di semua kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pertumbuhan ekonomi tampaknya hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Selain itu, rasio gini di Provinsi NTT mengalami peningkatan dari 0,336 pada Maret 2016 menjadi 0,351 pada Maret 2017. Hal ini mengindikasikan pembangunan NTT semakin timpang.²⁵

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi.²⁶

Adapun faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain net impor antar daerah dan impor luar negeri yang tumbuh meningkat, sehingga menjadi pengurang PDRB Provinsi NTT. Net impor antar daerah dan impor luar negeri tumbuh meningkat masing-masing sebesar 4,39% dan 314,99% dibandingkan tahun 2016 sebesar -0,28% dan 5,91%.²⁷

Peningkatan net impor antar daerah dan impor luar negeri terjadi karena meningkatnya investasi dan konsumsi di Provinsi NTT memerlukan peningkatan barang dan jasa yang perlu didatangkan dari daerah lain di dalam

²⁵BAPPENAS, Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tertinggi, (BAPPENAS: Jakarta, 2018), hlm. 5.

²⁶BAPPENAS, Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017, (BAPPENAS, 2017), hlm.18.

²⁷*Ibid.*

negeri dan luar negeri. Selain itu, adanya impor pesawat terbang pada November 2017 oleh salah satu maskapai yang beroperasi di Provinsi NTT turut menjadi penyumbang signifikan impor pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi NTT dengan pangsa lebih dari 70% terhadap total PDRB menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat, tercermin dari indikator peningkatan nilai tukar petani dan pendapatan berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai tahun 2017 dan bantuan sosial pemerintah, serta didukung oleh capaian inflasi yang lebih rendah dan terkendali.²⁸

Berdasarkan sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 mampu tumbuh progresif sebesar 4,88%, lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 2,37% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir seiring banyaknya pembukaan lahan pertanian baru serta peningkatan jaringan irigasi dan embung yang terus dilakukan. Selain itu, sumber pertumbuhan ekonomi baru yakni sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi di atas 10% dalam dua tahun terakhir yakni 14,46% pada 2016 dan 13,59% pada 2017. Fokus pengembangan sektor ekonomi utama yakni pertanian dan sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata dapat terus didorong guna lebih memajukan perekonomian Provinsi NTT.²⁹

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2017 masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari 18 provinsi yang termasuk dalam KTI, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT berada di peringkat ke-14, kalah dari beberapa provinsi terdekat seperti Maluku (5,81%) dan Bali (5,59%).³⁰

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi di wilayah KTI belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk khususnya kelompok miskin, karena pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI hanya melihat laju pertumbuhan tanpa memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan dengan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan yang sudah berlangsung selama ini belum menyentuh sektor-sektor yang berkaitan dengan kelompok miskin. Menurut Balisacan (2003), strategi pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin (*pro poor growth*) dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di bidang

²⁸*Ibid.*, hlm. 19.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

infrastruktur, pertanian, pengembangan modal manusia, dan akses teknologi. Artinya, distribusi pendapatan masih kurang merata, kualitas SDM masih rendah, dan ketersediaan infrastruktur masih terbatas.³¹

Menurut Djojohadikusumo (1994) disamping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Djojohadikusumo masalah pembangunan jangka panjang adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah.³²

Islam memandang pemerataan, karena perumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregat yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga.³³

Menurut Chapra (2002) pertumbuhan ekonomi Islam bukan sekedar persoalan ekonomi melainkan aktivitas manusia yang bertujuan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Pemerataan pertumbuhan ekonomi optimal ketika distribusi kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi dan pemerataan pendapatan tanpa menghasilkan efek buruk. Kemudian pertumbuhan ekonomi di dalam Islam tidak sekedar hanya pada peningkatan barang dan jasa, namun juga terkait pada aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan *ukhrawi*.

³¹BAPPENAS, Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tertinggi, (BAPPENAS: Jakarta, 2018), hlm. 36.

³²Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1994), hlm. 191.

³³Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 243.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak sekedar pencapaian materi semata namun juga ditinjau dari sisi perbaikan agama dan sosial.³⁴

Menurut Naf'an (2014) pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan suatu proses pertumbuhan yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan serta menciptakan ketentraman dan kenyamanan hidup.³⁵ Pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensional dan komperhensif dimana tujuan dari pertumbuhan tersebut tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan material semata tetapi juga mempertimbangkan akhirat. Pertumbuhan ekonomi tidak terfokus pada pertumbuhannya saja tetapi pada aspek keseimbangan atau pemerataan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Islam menentang bertumpuknya kekayaan hanya pada satu orang atau satu kelompok saja. Allah SWT berfirman dalam QS al-Hasyr: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”

Menurut Abdullah Abdul Husain al-Tariqi (2004) karakteristik pertumbuhan ekonomi di dalam Islam, yaitu; komprehensif (al-Syumul) Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial, berimbang (*Tawazun*) Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi.³⁶

Penekanan paling utama dalam pertumbuhan ekonomi terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah SWT.³⁷ Pemanfaatan sumber daya tersebut diikuti dengan distribusi yang merata berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu pembangunan ekonomi menurut Islam harus memprioritaskan pada stabilitas ekonomi, keadilan distributif, pemenuhan tenaga kerja, dan kepedulian terhadap alam.

Berdasarkan pada berbagai uraian di atas mengenai temuan dari pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, disimpulkan bahwa penekanan utama pada pertumbuhan ekonomi dalam Islam yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin yaitu ketika pertumbuhan ekonomi memberikan dampak secara menyeluruh ke berbagai kalangan maupun daerah. Karena pertumbuhan

³⁴M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge...*, hlm. 24.

³⁵Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah...*, hlm. 237.

³⁶Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 301.

³⁷Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah...*, hlm. 251.

ekonomi yang hanya difokuskan pada pertumbuhannya semata tidak akan berdampak pada penurunan kemiskinan, masih banyak daerah-daerah di NTT yang memiliki tingkat PDRB per kapita rendah sangat timpang dengan Kota Kupang yang merupakan Ibu Kota Provinsi NTT. Sehingga peningkatan PDRB per kapita yang terjadi pada setiap tahunnya tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek variabel IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) bahwa peningkatan IPM tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Sedangkan dalam jangka panjang variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, apabila IPM naik maka akan diikuti oleh turunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa IPM mampu menjadi tolok ukur untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang pada suatu daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dkk. (2016) bahwa peningkatan IPM mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyaty & David Kaluge (2017) menunjukkan hasil bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lavenia dkk. (2016) bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT menempati urutan terendah ketiga secara nasional setelah Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya sebesar 0,73% lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 0,91%. Pertumbuhan IPM yang tinggi hanya terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang tumbuh 5,87%, namun juga terjadi penurunan IPM yang cukup besar di Kabupaten Sumba Tengah hingga 3,32%.

Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator pengeluaran perkapita yang hanya sebesar 7,12 juta, dan menjadi pengeluaran perkapita terendah di Indonesia. Peringkat rata-rata pendidikan di NTT terendah keempat di Indonesia, dan harapan hidup juga terendah keenam dibanding provinsi lainnya. Angka kemiskinan menunjukkan sebagai Provinsi termiskin ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,01% dari populasi, jauh lebih besar dari nasional yang sebesar 10,7%. Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di NTT, terlihat bahwa semua kelompok usia didominasi oleh

pekerjaan informal. 79% pekerja berada di pedesaan dan lebih dari 50% berpendidikan SD dan terkonsentrasi di pedesaan.

NTT juga memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah. 56,2% pekerja memiliki latar belakang pendidikan hanyalah sekolah dasar, sedikit lebih baik dari Papua yang sebesar 57,2%. Berdasarkan sektor ekonomi, 53,3% pekerja bekerja di sektor pertanian. Hal ini menjadikan provinsi NTT sebagai provinsi dengan rasio pekerja petani terbesar kedua setelah Provinsi Papua. Sektor ekonomi dengan pekerja terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan (10,0%), industri pengolahan (7,4%), jasa pendidikan (6,6%) dan administrasi pemerintah (6,2%).

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di NTT yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat yaitu sebesar 63,73 tahun 2017 dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,39 namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 71,39. Rendahnya nilai IPM di NTT sejalan dengan rendahnya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tingginya nilai pendapatan perkapita Provinsi NTT, yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi NTT masih berjalan eksklusif dan tidak merata.

Kualitas masyarakat yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat bertahan dan turut mengendalikan perkembangan global ke arah yang baik. Masyarakat yang berkualitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan berliterasi sains yang baik meliputi kemampuan berpikir kreatif, menganalisis masalah, mengambil keputusan, bersikap dan menyelesaikan masalah. Namun, untuk membendung dampak negatif perkembangan global tidak cukup dengan kemampuan literasi sains tetapi juga butuh kemampuan literasi Islam yang baik. Kemampuan berliterasi Islam yang baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT meliputi pemahaman nilai-nilai tauhid *uluhiyah* dan tauhid *rububiyah*. Keseimbangan dalam pembangunan manusia berdasarkan kedua ranah ini merupakan aspek penting untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beradab, berkepribadian dan berkemajuan.³⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. al-Qasas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا آءَاتَكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

³⁸As'ad Bukhari, Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi, *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 No. 1 (Juni 2018), hlm. 5.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maqashid Syariah adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai falah, yaitu kebutuhan di dunia dan akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna (al-Syatibi). Kebutuhan dasar tersebut mencakup lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Kelima pokok tersebut dijelaskan sesuai dengan urutannya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tashiniyyah* yang akan dijelaskan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.³⁹

Menurut Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.⁴⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu; sumber daya yang dapat dikelola, sumber daya manusia (*human resources*), wirausaha, dan teknologi. Pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.⁴¹

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang baik namun kualitas sumber daya manusia sangat rendah. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh *resources*

³⁹Djamil Fathurrahman, *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 41.

⁴⁰Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 307.

⁴¹Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah...*, hlm. 238.

yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam pembangunan ekonomi Islam kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh besar karena sumber daya alam yang ada sudah diciptakan oleh Allah SWT dan manusia dituntut untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat berproduktifitas dengan baik. Komponen pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak perlu ditingkatkan agar berdampak pada produktifitas masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada uji analisis yang telah dijelaskan, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, apabila jumlah penduduk naik maka akan diikuti oleh meningkatnya kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk mampu menjadi tolok ukur dalam mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2018) dan Azizah dkk. (2018) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riry Isramiwarti dkk. (2017) jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 5.371.519 jiwa yang terdiri atas 2.660.613 laki-laki dan 2.710.906 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2018 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah 1,67 persen.⁴²

SDM merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah. Dari sisi kependudukan dan ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah anggota rumah tangga. Berdasarkan data BPS, tingkat pertumbuhan penduduk di sejumlah Provinsi di wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia) masih cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak terhadap besarnya jumlah anggota rumah tangga dan angka rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) di wilayah KTI tersebut. tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berdampak pada struktur umur penduduk, yang selanjutnya berimplikasi pada tingginya angka atau rasio beban ketergantungan. Di beberapa provinsi di KTI, rata-rata angka beban

⁴²BPS, *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2019*, (BPS: 2019), hlm. 85.

ketergantungan di atas angka nasional yang hanya 48,6 persen. Bahkan Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT sudah di atas angka 60. Hal ini berarti, setiap 10 orang yang bekerja harus menanggung beban 6 orang lainnya yang tidak bekerja.⁴³

Aliran Malthusin berpendapat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk berjalan berdasarkan deret ukur, sedangkan pertumbuhan/pertambahan makanan berdasarkan deret hitung. Artinya semakin bertambah jumlah penduduk maka pengeluaran pemerintah akan bertambah sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat, daya beli meningkat maka akan mengakibatkan kelangkaan harga sehingga daya beli masyarakat akan berkurang lalu akan mengurangi tingkat pendapatan sehingga akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin.⁴⁴

Pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah pertumbuhan penduduk yang memiliki keseimbangan dalam regenerasi dan keserasian anatar kuantitas dan kualitas sehingga memiliki kemampuan ekonomi dan generasi yang berkualitas sehingga dapat berproduktifitas dan terhindar dari kemiskinan.

Dengan banyaknya penduduk yang berproduktifitas serta adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, diharapkan menjadi modal dalam memperlancar pembangunan suatu daerah yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Peningkatan pembangunan suatu daerah diharapkan terjadi secara adil dan merata sehingga memperkecil ketimpangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memperoleh hasil dari apa yang telah diusahakannya. Untuk itu produktifitas seseorang sangat penting karena berdampak pada hasil/output yang akan diperolehnya.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرُ صِنْفٍ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجُزُ

⁴³BAPPENAS, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tertinggi*, (BAPPENAS: Jakarta, 2018), hlm. 40.

⁴⁴Herman, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 6, No. 2, (JULI 2018), hlm. 169.

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَلَنْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذًا وَكَذَا وَلَكِنْ لَوْلَا أُنزِلَ اللَّهُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّا تَكْفُرُونَ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah; 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.”⁴⁵

Dalam hadits di atas Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa orang beriman dengan keimanannya dia sudah memiliki kriteria baik. Namun akan lebih baik lagi dan lebih Allah cintai, jika keimanannya diiringi dengan kekuatan, baik kekuatan rohani, fisik, harta, ilmu, dll. Karena dengan kekuatan tersebut akan banyak yang dapat dia lakukan. Akan tetapi semua kekuatan dan potensi yang dimiliki, jika tidak diiringi sebuah orientasi yang jelas juga tidak berguna. Maka dari itu umat Islam diwajibkan untuk berproduktifitas.

Menurut Abdul Sami' Mishri (2006) bekerja tidak hanya sekedar sebagai pendorong manusia untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan, namun merupakan asas segala sesuatu. Bekerja merupakan fondasi dasar untuk mendekati diri kepada Allah. Untuk itu, al-Quran senantiasa mengiringi lafal 'amal dengan lafal iman.⁴⁶ Bekerja merupakan asas kehidupan Islam, Islam sangat mendorong setiap muslim untuk bekerja secara sungguh-sungguh dengan etos kerja tinggi, bekerja secara optimal dengan menghilangkan segala hambatan dan tantangan.

⁴⁵Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 142.

⁴⁶Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, penerjemah Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.6.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh bahwa dalam jangka panjang variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyaty & David Kaluge (2017) bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Sedangkan dalam jangka pendek variabel TPT berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, ketika TPT naik maka akan diikuti oleh meningkatnya kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa TPT mampu menjadi tolok ukur dalam mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang & Woyanti (2018) bahwa tingkat pengangguran memberi pengaruh positif terhadap kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustina dkk. (2018) bahwa kenaikan jumlah pengangguran berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan.

Pengangguran merupakan masalah yang rumit di setiap daerah karena pembangunan ekonomi yang telah tercipta belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya. Karena itu masalah pengangguran memerlukan penanganan yang komprehensif. Masalah pengangguran akan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen perdagangan anak dan sebagainya menjadi penyakit sosial yang sulit diberantas.⁴⁷

Hasil Sakernas 2018, angkatan kerja tahun 2018 berjumlah 2.486.281 orang atau 70,17 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,99 persen berstatus bekerja. Tingkat pengangguran tercatat 3,01.⁴⁸ Berdasarkan status pekerjaan utama juga terlihat bahwa pekerja terbanyak di NTT adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas pekerja pertanian ataupun karakter industri pengolahan NTT yang masih bersifat industri rumahan, berbeda dengan industri di Jawa yang mulai beralih ke industri menengah dan besar. Rata-rata gaji yang didapat per jam juga menunjukkan bahwa 84,1% pekerja di NTT hanya

⁴⁷M. Cholil Nafis, *Kependudukan dalam Islam*, (Mitra Abadi Press: Jakarta, 2011), hlm. 139.

⁴⁸BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2019, (BPS, 2019), hlm. 85.

mendapat gaji kurang dari 10 ribu per jam atau 85,5% penduduk mendapat gaji kurang dari 1,5 juta per bulan, lebih rendah dari UMP NTT 2017 yang sebesar Rp 1.525.000.⁴⁹

Sebanyak 393 ribu atau 20,75% pekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar dan 30,42% atau 576 ribu pekerja merupakan buruh tidak tetap. Pekerja dengan penghasilan rendah tersebut terkonsentrasi pada sektor pertanian, selain juga pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Adapun pekerja dengan pendapatan terbesar adalah pekerja formal dengan status karyawan.⁵⁰

Dengan demikian walaupun angka pengangguran terbuka di NTT relatif rendah, namun permasalahan utama ketenagakerjaan di NTT adalah pada kualitas pekerjaan yang rendah, meliputi terlalu banyaknya pekerjaan sektor informal dan pekerjaan utama berupa pekerja keluarga tidak dibayar ataupun buruh tidak tetap dengan sebagian besar pekerja memperoleh gaji yang rendah atau bahkan tidak memperoleh penghasilan. Pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar industrialisasi dapat berkembang di NTT. Ketidakefisienan proses produksi pertanian dapat dilakukan dengan menggeser pekerja pertanian ke sektor formal lainnya dan menerapkan sistem mekanisasi untuk menekan biaya produksi, mempercepat dan meningkatkan produksi.⁵¹

Dalam pandangan Islam solusi pengangguran ditujukan kepada kedua belah pihak; pertama kepada pemerintah dan kedua kepada individunya sendiri. Menurut Islam, untuk dapat terciptanya lapangan kerja yang luas dan tenaga kerja yang siap pakai, maka kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Tidak hanya berpihak kepada kelompok tertentu yang hanya akan memperoleh keuntungan sepihak saja.⁵²

Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyatnya, disamping itu rakyatpun dituntut untuk semangat dan menggunakan potensinya untuk bekerja agar tidak menganggur dan menyebabkan kemiskinan. Dalam Islam pun sangat ditekankan untuk merubah nasibnya tanpa harus menunggu bantuan orang lain.⁵³ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Rad: 11:

⁴⁹BAPPENAS, Prada Profil dan Analisis Daerah Provinsi: Nusa Tenggara Timur 2017, hlm. 24.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 30.

⁵²M. Cholil Nafis, *Kependudukan dalam Islam*, (Mitra Abadi Press: Jakarta, 2011), hlm. 142.

⁵³*Ibid.*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” QS. Al-Najm: 39

Kedua ayat di atas memerintahkan manusia untuk berusaha maksimal karena sesungguhnya usaha dari diri sendirilah yang mampu menentukan nasib manusia. Kaum muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi untuk membebaskan dirinya dari pengangguran. Dalam Al-Qur’an surat At-Tawbah: 105 juga Allah SWT telah menganjurkan untuk bekerja, ayat tersebut sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا لِسَيِّرَىٰ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ ظُلْمِ الْعَلِيِّبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Menurut Tafsir Quraish Shihab ayat tersebut bermakna bahwa, katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu.

Maksud perintah Allah swt. supaya manusia bekerja, namun tidak boleh lupa bahwa apapun yang dikerjakan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin yang bermakna penyaksian dan kelak akan diperhadapkan kembali kepada Allah swt. mengenai apa yang telah dikerjakan.⁵⁴ Ayat tersebut bermakna penting atas jawaban manusia terhadap pekerjaan atau amal yang dilaksanakannya.

⁵⁴Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pengujian data dan analisis yang telah dilakukan mengenai determinan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif. Jangka pendek dengan probabilitas sebesar 0.8813 dan koefisien sebesar -0.339325 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -0.339325. Kemudian jangka panjang dengan probabilitas sebesar 0.1461 dan koefisien sebesar -5.622743 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -5.622743.

Hal tersebut disebabkan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap daerah sehingga menyebabkan ketimpangan. Padahal di dalam pembangunan ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus disertai dengan pemerataan sehingga tidak terjadi *gap* antar kaya dan miskin serta diharapkan distribusi pendapatan yang merata.

2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa IPM dalam jangka pendek IPM berpengaruh positif sedangkan dalam jangka panjang IPM berpengaruh negatif signifikan. Jangka pendek dengan probabilitas sebesar 0.3545 dan koefisien sebesar 0.195309 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen IPM akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.195309. Kemudian jangka panjang dengan probabilitas sebesar 0.0000 dan koefisien sebesar -1.802331 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen IPM akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -1.802331.

Kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota Provinsi NTT masih berada di bawah rata-rata nasional. Dalam Islam kualitas sumber daya manusia harus didukung dengan kemampuan literasi Islam yang baik, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT meliputi pemahaman nilai-nilai tauhid *uluhiyah* dan tauhid *rububiyah* sehingga menghasilkan manusia yang beradab, berkepribadian dan berkemajuan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Jangka pendek dengan probabilitas sebesar 0.0008 dan koefisien sebesar 0.000101 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.000101. Kemudian

jangka panjang dengan probabilitas sebesar 0.0000 dan koefisien sebesar 0.000241 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.000241.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang menurut Islam yaitu pertumbuhan yang memiliki keserasian antar kuantitas dan kualitas. Penduduk diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat berproduktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi mampu menurunkan angka kemiskinan.

4. Berdasarkan uji analisis yang telah dilakukan dalam jangka panjang TPT berpengaruh negatif sedangkan dalam jangka pendek TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Jangka panjang dengan probabilitas sebesar 0.0073 dan koefisien sebesar -1.555441 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen TPT akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -1.555441. Kemudian jangka pendek dengan probabilitas sebesar 0.8948 dan koefisien sebesar 0.041693 bermakna bahwa setiap peningkatan 1 persen TPT akan menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0.041693.

Solusi pengangguran dalam Islam ditujukan kepada pihak pemerintah dan rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat dan rakyatpun diharapkan untuk berproduktifitas sehingga mampu merubah nasibnya.

5. Secara simultan (bersama-sama) baik dalam jangka pendek maupun panjang variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan TPT mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan nilai probabilitas F-statistik jangka pendek sebesar 0,001108 dan jangka panjang sebesar 0,000000.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan diharapkan pemerintah dapat mengecilkan kesenjangan antar daerah yang terjadi. Tidak melulu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi diikuti dengan pemerataan antar daerah.
2. Faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat yang merupakan indikator dalam IPM perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.

3. Pemerintah harus fokus pada menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan kehidupan yang lebih layak/merata untuk mencukupi kehidupan masing-masing.
4. Pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar industrialisasi dapat berkembang di Provinsi NTT.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan., 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Alhudori, M., 2017, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, *Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No. 1.
- al-Husein, Abu., 1918, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub.
- Al-Qardawi, Syekh Muhammad Yusuf., 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Zikrul Hakim: Jakarta.
- Al-Qhardawy, Syekh Muhammad Yusuf., 1996, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky., 2017, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8 No. 2.
- Arsyad, Lincoln., 2016, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik., 2010, *Katalog Statistik Indonesia Tahun 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badriyah, Siti., 2016, Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB Jawa Tengah Menggunakan Panel *Vector Error Correction Model* (PVECM), *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- BAPPENAS., 2017, Prada Profil dan Analisis Daerah Provinsi: Nusa Tenggara Timur 2017.
- BAPPENAS., 2017, Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017.
- BAPPENAS., 2018, Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tertinggi, Jakarta: BAPPENAS.
- Beik, Irfan Syauqi, & Arsyianti, Laily Dwi., 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boediono., 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- BPS., 2010, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2010.
- BPS., 2011, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2011.
- BPS., 2012, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2012.
- BPS., 2013, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2013.
- BPS., 2014, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2014.
- BPS., 2015, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2015.
- BPS., 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2016.
- BPS., 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017.
- BPS., 2018, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018.
- BPS., 2018, Berita Resmi Statistik: Profil Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT 2018.
- BPS., 2018, Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Provinsi NTT 2018.
- BPS., 2018, Berita Resmi Statistik: Profil Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2018.
- BPS., 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2018.
- BPS., 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2019.

- Budihardjo, Eko, & Sujarto, Djoko., 2007, *Pembangunan Kota Berkelanjutan*, (Bandung: Penerbit ITB Campbell).
- Bukhari, As'ad., 2018, Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi, *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 No. 1.
- Canova F, & Ciccarelli, M., 2013, *Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. Advance in Econometrics*.
- Chapra, M. Umar., 2002, *Islam and Economic Challenge, Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI., 2010, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, Bandung: Diponegoro.
- Djojohadikusumo, Sumitro., 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Fathurrahman, Djamil., 1995, *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Fikri, Abdullah., 2016, Konseptualisasi dan Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun Demokrasi Inklusif Bagi Kaum Difabel di Indonesia, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 1.
- Herman., 2018, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Pekanbaru, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 6, No. 2.
- Hermansyah., 2014, Konsepsi Pemikiran Ekonomi Profetik, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2.
- Huda, Nurul, dkk., 2016, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Huda, Nurul., 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jhinghan, M. L., 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada).
- Kuncoro, Mudrajat., 2010, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat., 2001, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Martono, Nanang., 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljarto, Tjokroaminoto., 1995, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Muslim., 2016, Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Wahana* Vol. 1, No. 10.
- Naf'an., 2014, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafis, M. Cholil., 2011, *Kependudukan dalam Islam*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nawawi, Ismail., 2009, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- P. Todaro, Michael, & C. S, Stephen., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- Robinson, & Taringan., 2014, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Said, R., 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan sosial.
- Subandi., 2012, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono., 2004, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono., 2010, *Ekonomi Pembangunan: Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Suryawati C., 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain., 2004, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Windra, Pan Budi Marwoto, Yudi Rafani., 2016, Analisis Pengaruh Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, Vol 14 No. 2.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

I. Lampiran I: Hasil Uji Deskriptif

Date: 01/22/20

Time: 16:24

Sample: 2011 2018

	KEMISKIN				
	AN	PDRB	IPM	JP	TPT
Mean	50.07720	10469.96	63.92470	236130.4	3.176905
Median	43.85000	9057.800	62.90000	244599.5	2.795000
Maximum	144.0000	37237.39	78.84000	465970.0	14.25000
Minimum	16.00000	2051.160	52.51000	63721.00	0.250000
Std. Dev.	27.58992	5716.601	4.937265	100943.6	2.374158
Skewness	1.246375	3.083283	0.839989	0.232502	2.595891
Kurtosis	4.463231	12.92811	4.381229	2.439733	11.26234
Jarque-Bera	58.48396	956.1572	33.11084	3.710894	666.5456
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.156383	0.000000
Sum	8412.970	1758954.	10739.35	39669913	533.7200
Sum Sq. Dev.	127121.0	5.46E+09	4070.890	1.70E+12	941.3168
Observations	168	168	168	168	168

II. Lampiran II: Hasil Uji Akar Unit (*unit root test*)

- Level (ADF)
 - Kemiskinan

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: KEMISKINAN

Date: 12/28/19 Time: 06:02

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	28.3607	0.9467
ADF - Choi Z-stat	1.42314	0.9227

- **PDRB**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: LNPDRB

Date: 01/23/20 Time: 06:49

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	21.7697	0.9958
ADF - Choi Z-stat	7.01148	1.0000

- **IPM**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: IPM

Date: 12/28/19 Time: 05:58

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	33.7778	0.8131
ADF - Choi Z-stat	-0.43571	0.3315

- **JP**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: JP

Date: 01/23/20 Time: 06:19

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1
 Total (balanced) observations: 126
 Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	25.4933	0.9792
ADF - Choi Z-stat	8.36863	1.0000

- TPT

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
 Series: TPT
 Date: 12/28/19 Time: 06:07
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 User-specified lags: 1
 Total (balanced) observations: 126
 Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	45.5026	0.3284
ADF - Choi Z-stat	-0.80482	0.2105

• 1different (ADF)

- Kemiskinan

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
 Series: D(KEMISKINAN)
 Date: 12/28/19 Time: 06:03
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: None
 User-specified lags: 1
 Total (balanced) observations: 105
 Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	116.933	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-6.41540	0.0000

PDRB

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(LNPDRB)

Date: 01/23/20 Time: 06:50

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 105

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	94.6567	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-2.38662	0.0085

- **IPM**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(IPM)

Date: 12/28/19 Time: 05:58

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 105

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	99.5320	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-5.97977	0.0000

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(JP)

Date: 12/29/19 Time: 06:29

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 105

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	182.962	0.0000
ADF - Choi Z-stat	-8.72747	0.0000

- JP

- TPT

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(TPT)

Date: 12/28/19 Time: 06:07

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Total (balanced) observations: 105

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
ADF - Fisher Chi-square	70.6603	0.0037
ADF - Choi Z-stat	-3.11248	0.0009

• Level (Levin)

- Kemiskinan

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: KEMISKINAN

Date: 01/23/20 Time: 05:50

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total number of observations: 144

Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	3.025	0.998
Levin, Lin & Chu t*	05	8

- PDRB

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: LNPD RB

Date: 01/23/20 Time: 05:55

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total number of observations: 145

Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	7.563	1.000
Levin, Lin & Chu t*	27	0

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: IPM
 Date: 01/23/20 Time: 05:44
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: None
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 147
 Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
Levin, Lin & Chu	0.1289	0.448
IPM	1	7

- JP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: JP
 Date: 01/23/20 Time: 06:17
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 User-specified lags: 1
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 126
 Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
Levin, Lin & Chu t*	0.749	0.773
	98	4

- TPT

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: TPT

Date: 01/23/20 Time: 06:22

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

User-specified lags: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	-	
Levin, Lin & Chu t*	2.1307 6	0.016 6

- **1different (Levin)**

- **Kemiskinan**

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: D(KEMISKINAN)

Date: 01/23/20 Time: 05:51

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	-	
	14.064	0.000
Levin, Lin & Chu t*	7	0

- **PDRB**

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: D(LNPDRB)
 Date: 01/23/20 Time: 05:56
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 126
 Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	-	
Levin, Lin & Chu t*	10.529 1	0.000 0

- **IPM**

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: D(IPM)
 Date: 01/23/20 Time: 05:45
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 Automatic selection of maximum lags
 Automatic lag length selection based on SIC: 0
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 126
 Cross-sections included: 21

Method	Statisti c	Prob.* *
	-	
Levin, Lin & Chu t*	10.152 2	0.000 0

- **JP**

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)
 Series: D(JP)

Date: 01/23/20 Time: 06:18
 Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 User-specified lags: 1
 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 105
 Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.*
	c	*
	-	
	525.56	0.000
Levin, Lin & Chu t*	0	0

- **TPT**

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series: D(TPT)

Date: 02/21/20 Time: 11:54

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

User-specified lags: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 105

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.*
	c	*
	-	
	6.9648	0.000
Levin, Lin & Chu t*	3	0

• **Level (PP)**

- **Kemiskinan**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: KEMISKINAN

Date: 01/23/20 Time: 05:53

Sample: 2011 2018
 Exogenous variables: Individual effects
 Newey-West automatic bandwidth selection and
 Bartlett kernel
 Total (balanced) observations: 147
 Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	46.1391	0.3051
PP - Choi Z-stat	0.26044	0.6027

- **PDRB**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(LNPDRB)

Date: 01/23/20 Time: 06:16

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and
 Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	124.847	0.0000
PP - Choi Z-stat	-7.32902	0.0000

- **IPM**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: IPM

Date: 01/23/20 Time: 05:48

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and
 Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 147

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	28.2213	0.9489
PP - Choi Z-stat	0.20189	0.5800

- JP

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: JP

Date: 01/23/20 Time: 06:20

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 147

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	31.8539	0.8722
PP - Choi Z-stat	1.60844	0.9461

- TPT

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: TPT

Date: 01/23/20 Time: 06:27

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: None

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 147

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	33.7983	0.8124
PP - Choi Z-stat	-0.17807	0.4293

- **1different (PP)**

- **Kemiskinan**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(KEMISKINAN)

Date: 01/23/20 Time: 05:54

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	145.761	0.0000
PP - Choi Z-stat	-7.90951	0.0000

- **PDRB**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(LNPDRB)

Date: 01/23/20 Time: 06:16

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	124.847	0.0000
PP - Choi Z-stat	-7.32902	0.0000

- IPM

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(IPM)

Date: 01/23/20 Time: 05:49

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and

Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	74.3164	0.0015
PP - Choi Z-stat	-4.32956	0.0000

- JP

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(JP)

Date: 01/23/20 Time: 06:20

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and

Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	267.487	0.0000
PP - Choi Z-stat	-12.4140	0.0000

- **TPT**

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(TPT)

Date: 01/23/20 Time: 06:27

Sample: 2011 2018

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 126

Cross-sections included: 21

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	203.276	0.0000
PP - Choi Z-stat	-9.88874	0.0000

III. **Lampiran III: Hasil Uji Kao Residual Cointegration**

Kao Residual Cointegration Test

Series: KEMISKINAN LNPDRB IPM JP TPT

Date: 12/29/19 Time: 07:01

Sample: 2011 2018

Included observations: 168

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: No deterministic trend

User-specified lag length: 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

	t-Statistic	Prob.
ADF	-4.462179	0.0000
Residual variance	49.93603	
HAC variance	25.52051	

IV. **Lampiran VI: Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

LNPDRB	-5.622743	3.850026	-1.460443	0.1461
IPM	-1.802331	0.280568	-6.423867	0.0000
JP	0.000241	1.20E-05	20.02411	0.0000
TPT	-1.555441	0.572271	-2.718015	0.0073
C	164.9402	31.36043	5.259502	0.0000
R-squared	0.723324			
Adjusted R-squared	0.716534			
F-statistic	106.5342			
Prob(F-statistic)	0.000000			

V. Lampiran V: Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNPDRB)	-0.339325	2.267712	-0.149633	0.8813
D(IPM)	0.195309	0.210229	0.929030	0.3545
D(JP)	0.000101	2.93E-05	3.431372	0.0008
D(TPT)	0.041693	0.314692	0.132490	0.8948
ECT(-1)	-0.134603	0.040181	-3.349943	0.0010
C	0.907044	0.584887	1.550801	0.1232
R-squared	0.132664			
Adjusted R-squared	0.101908			
F-statistic	4.313363			
Prob(F-statistic)	0.001108			

T. Lampiran IV: Respon Kemiskinan Terhadap *Shock* Variabel Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Resp
onse
of
KEMI
SKIN
AN:

Perio KEMISKIN

d	AN	LNPDRB	IPM	JP	TPT
1	3.769566	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	1.285957	-0.348172	-1.771653	-0.555709	0.187030
3	2.193506	2.377247	-0.129470	0.936153	-0.180232
4	1.692353	-11.51774	0.022081	-0.922588	-0.155256
5	2.506944	9.941511	-0.650508	0.967494	0.809094
6	0.996262	-16.41116	0.339463	-0.247618	0.515473
7	3.708699	20.53758	-0.529670	0.904516	-0.467000
8	0.084391	-27.70027	0.386373	-0.987577	0.541522

VII. Lampiran VII: Hasil Analisis *Varian Decomposition*

VIII.

Varia
nce
Deco
mposi
tion of
KEMI
SKIN
AN:
Perio



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KEMISKIN

d	S.E.	AN	LNPDRB	IPM	JP	TPT
1	3.769566	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	4.412152	81.48788	0.622711	16.12339	1.586329	0.179688
3	5.554771	67.00522	18.70827	10.22676	3.841113	0.218644
4	12.93266	14.07373	82.76703	1.886956	1.217529	0.054748
5	16.56460	10.86922	86.47111	1.304427	1.083294	0.271953
6	23.34838	5.652816	92.92738	0.677689	0.556496	0.185622
7	31.33704	4.538711	94.53902	0.404777	0.392243	0.125253
8	41.84185	2.546221	96.85548	0.235571	0.275722	0.087006

VIII. Lampiran: Data Penelitian

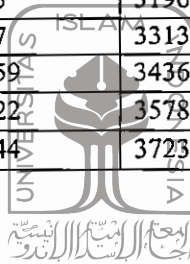
Kab/kota	Tahun	Kemiskinan	PDRB	IPM	JP	TPT
SumbaBarat	2011	34	8586,02	64,31	113.189	3,11
SumbaBarat	2012	34,6	8857,12	64,88	116.621	1,86
SumbaBarat	2013	34,2	9149,87	65,49	117.787	3,29
SumbaBarat	2014	33,5	9416,54	60,9	119.907	2,58
SumbaBarat	2015	37,4	9703,34	61,36	121.921	1,8
SumbaBarat	2016	36,21	10030,36	61,85	123.913	2,7
SumbaBarat	2017	36,69	10377,27	62,3	125.776	3,83
SumbaBarat	2018	36,3	10721,71	62,91	127.870	4,06
SumbaTimur	2011	71,5	11568,12	62,5	232.237	2,16
SumbaTimur	2012	72,5	11956,07	63,33	238.241	3,05
SumbaTimur	2013	68,8	12366,55	63,8	240.190	3,76
SumbaTimur	2014	67,4	12830,94	62,04	243.009	1,69
SumbaTimur	2015	78	13295,51	62,54	246.294	3,14
SumbaTimur	2016	78,19	13782,82	63,22	249.606	2,1
SumbaTimur	2017	78,18	14314,13	64,19	252.704	2,9
SumbaTimur	2018	76,8	14899,65	64,65	255.600	1,42
Kupang	2011	61	10434,51	66,77	310.573	2,25
Kupang	2012	61,9	10691,99	67,12	321.384	2,54
Kupang	2013	101,5	10937,65	67,74	328.688	3
Kupang	2014	65	11163,22	61,68	338.415	1,85
Kupang	2015	81	11405,97	62,04	348.010	1,8
Kupang	2016	82,57	11550,73	62,39	360.228	1,3
Kupang	2017	84,35	11734,23	62,79	372.777	3,52
Kupang	2018	88,67	11859,58	63,55	387.480	2,71
TTS	2011	122,3	7447,13	66,29	449.881	1,16
TTS	2012	124	7705,83	66,61	453.386	0,94
TTS	2013	126	7979,63	66,83	451.922	1,35
TTS	2014	122,5	8251,47	59,41	456.152	1,69
TTS	2015	144	8553,72	59,09	459.310	3,47
TTS	2016	138,43	8916,83	60,37	461.681	3,4
TTS	2017	136,45	9347,88	61,08	463.980	1,7
TTS	2018	130,63	9746,82	61,58	465.970	1,01
TTU	2011	50,4	8558,04	67,93	234.349	1,41
TTU	2012	51,2	8818,63	68,57	238.426	1,62
TTU	2013	51,8	9104,18	68,94	239.503	2,87
TTU	2014	50,7	9419,56	60,41	242.082	2,2

TTU	2015	62	9752,99	60,96	244.714	1,88
TTU	2016	59,34	10120,38	61,54	247.216	1,7
TTU	2017	58,6	10533,06	62,03	249.711	0,6
TTU	2018	56,09	10954,87	62,65	251.990	0,85
Belu	2011	52,8	8771,92	64,75	359.266	3,14
Belu	2012	53,5	9049,44	65,52	370.770	2,21
Belu	2013	29,3	10681,72	66,24	199.990	3,91
Belu	2014	54,5	11095,15	59,72	203.284	2,96
Belu	2015	34,8	11487,89	60,54	206.778	5,39
Belu	2016	33,13	11946,33	61,04	210.307	4,3
Belu	2017	33,95	12442,58	61,44	213.596	2,47
Belu	2018	33,91	12958,79	61,86	216.780	5,26
Alor	2011	38,9	7132,23	68,92	193.785	3,53
Alor	2012	39,4	7407,95	69,35	196.179	1,64
Alor	2013	39,6	7643,47	69,67	196.613	2,83
Alor	2014	38,7	7947,06	58	198.200	3,45
Alor	2015	45,8	8264,52	58,05	199.915	3,59
Alor	2016	44,95	8574,09	58,99	201.515	3,5
Alor	2017	43,9	8930,97	59,61	202.890	1,86
Alor	2018	44,13	9360,92	60,14	204.380	4,09
Lembata	2011	30,5	6559,07	68,07	120.160	2,79
Lembata	2012	30,9	6696,05	68,69	124.912	4,82
Lembata	2013	29,6	6876,87	69,17	126.704	3,56
Lembata	2014	29,1	7069,42	61,45	129.482	6,73
Lembata	2015	35,9	7271,11	62,16	132.171	3,05
Lembata	2016	35,18	7481,75	62,81	134.573	3
Lembata	2017	36,26	7675,06	63,09	249.711	4,18
Lembata	2018	36,95	7910,3	63,96	140.390	5,4
FloresTimur	2011	21,6	10269,34	68,71	237.207	2,52
FloresTimur	2012	21,9	10602,35	69,19	241.053	5,6
FloresTimur	2013	19,6	11005,61	70,03	241.590	3,34
FloresTimur	2014	19,2	11399,04	60,42	244.485	2,41
FloresTimur	2015	24	11806,24	61,24	246.994	3,9
FloresTimur	2016	25,65	12273,81	61,9	248.889	3,7
FloresTimur	2017	26,97	12770,13	62,89	251.611	5,45
FloresTimur	2018	27,99	13139,31	63,55	253.820	4,01
Sikka	2011	38,9	7577,92	68,22	306.269	2,69
Sikka	2012	39,4	7817,01	68,74	309.074	2,8

Sikka	2013	39,2	8081,98	69,18	309.008	3,62
Sikka	2014	38,3	8383,73	61,36	311.411	5,24
Sikka	2015	44,6	8695,55	61,81	313.509	0,65
Sikka	2016	45,14	9066,16	62,42	315.477	0,63
Sikka	2017	45,01	9486,38	63,08	317.292	2,5
Sikka	2018	44,02	9929,93	63,89	318.920	2,43
Ende	2011	54,5	10531,3	67,58	265.761	3,67
Ende	2012	55,3	10625,54	68,08	267.262	2,84
Ende	2013	56,2	11527,54	68,67	266.909	4,52
Ende	2014	54,7	12040,82	65,25	268.314	2
Ende	2015	63,2	12586,42	65,54	269.724	3,4
Ende	2016	64,65	13170,21	65,74	270.886	3,2
Ende	2017	65,11	13771,01	66,11	272.084	3,66
Ende	2018	66,01	14413,5	66,62	272.990	2,89
Ngada	2011	16,6	10625,54	70,13	145.210	0,74
Ngada	2012	16,8	11103,86	70,63	148.969	0,76
Ngada	2013	16,9	11527,54	70,89	150.186	1,34
Ngada	2014	16,5	12040,82	64,64	152.519	0,83
Ngada	2015	19,9	12586,42	65,01	154.693	1,32
Ngada	2016	19,76	12761,81	65,61	156.101	1
Ngada	2017	20,21	13138,03	66,47	159.081	3,23
Ngada	2018	20,79	13646,69	67,1	161.200	2,11
Manggarai	2011	64,7	6761,52	67,81	298.236	2,87
Manggarai	2012	65,7	6988,48	68,3	307.140	0,92
Manggarai	2013	65,2	7248,3	68,69	309.614	1,95
Manggarai	2014	63,9	7500,23	60,08	314.491	3,95
Manggarai	2015	74	7748,8	60,87	319.607	3,99
Manggarai	2016	72,65	8034,85	61,67	324.014	3,4
Manggarai	2017	71,86	8309,94	62,24	329.198	4,09
Manggarai	2018	69,32	8609,46	63,32	333.910	3,21
RoteNdao	2011	38,2	10370,61	66,61	122.280	2,55
RoteNdao	2012	38,7	10382,74	67,1	125.035	4,09
RoteNdao	2013	39,1	10370,34	67,7	137.182	2,48
RoteNdao	2014	38,6	10500,84	57,82	142.106	4,89
RoteNdao	2015	45	10602,26	58,32	147.778	2,37
RoteNdao	2016	45,06	10714,01	59,28	153.792	2,3
RoteNdao	2017	45,57	10887,37	60,51	159.614	2,52
RoteNdao	2018	46,13	11052,21	61,51	165.810	2,11

ManggaraB	2011	43,8	6799,47	66,09	226.089	2,81
ManggaraB	2012	44,4	6884,33	66,84	236.604	3,37
ManggaraB	2013	44,1	7009,95	67,38	240.905	1,97
ManggaraB	2014	42,6	7151,17	59,64	245.817	2,81
ManggaraB	2015	51	7293,89	60,04	251.689	2,36
ManggaraB	2016	49,55	7465,68	60,63	257.582	2,2
ManggaraB	2017	49,39	7681,5	61,65	263.207	1,3
ManggaraB	2018	48,53	7914,67	62,58	269.030	1,19
SumbahTe	2011	20,5	8140,27	61,22	63.721	1,98
SumbahTe	2012	20,9	8346,29	61,7	65.606	1,19
SumbahTe	2013	21,3	8555,1	62,29	66.314	0,48
SumbahTe	2014	21,3	8773,59	57,6	67.393	0,25
SumbahTe	2015	24,7	9033,37	57,91	68.515	3,81
SumbahTe	2016	25,34	9325,22	58,52	69.606	3,8
SumbahTe	2017	25,37	2051,16	59,39	70.719	1,61
SumbahTe	2018	24,93	9950,76	60,07	71.800	3,57
SBD	2011	82,1	5294,48	61,42	290.539	1,25
SBD	2012	83,3	5511,49	62,48	302.241	2,89
SBD	2013	82,7	5688,56	63,05	306.195	2,81
SBD	2014	81	5798,7	59,9	312.510	3,07
SBD	2015	96,5	5941,74	60,53	319.119	2,87
SBD	2016	99,26	6111,86	61,31	325.699	2,7
SBD	2017	99,55	29704,68	61,46	331.894	4,26
SBD	2018	97,28	6482,65	61,89	338.430	1,01
Nagekeo	2011	16	7227,73	66,59	132.694	2,38
Nagekeo	2012	16,2	7441,63	67,23	135.419	1,62
Nagekeo	2013	16,5	7681,79	67,93	136.201	1,14
Nagekeo	2014	16,6	7932,06	62,71	137.919	2,5
Nagekeo	2015	20	8195,97	63,33	139.577	1,95
Nagekeo	2016	19,18	8464,42	63,93	141.310	1,8
Nagekeo	2017	19,21	8787,57	64,74	142.804	3,6
Nagekeo	2018	18,69	9089,83	65,35	144.410	1,88
ManggaraiT	2011	29,5	5220,97	66,55	257.744	2,81
ManggaraiT	2012	64,4	5448,25	67,06	263.786	2,06
ManggaraiT	2013	66,1	5668,94	67,62	264.979	2,75
ManggaraiT	2014	64,7	5894,85	56,58	268.418	0,37
ManggaraiT	2015	76,37	6099,41	56,83	272.514	2,18
ManggaraiT	2016	77,7	6318,4	57,5	276.620	2

ManggaraiT	2017	74,85	6561,81	58,51	280.118	0,5
ManggaraiT	2018	74,88	6810,88	59,49	283.310	1,57
SabuRaijua	2011	29,5	6860,63	56,12	74.403	3,35
SabuRaijua	2012	29,9	7073,43	57,12	75.048	13,41
SabuRaijua	2013	25,3	7219,14	57,74	80.897	4,83
SabuRaijua	2014	24,8	7353,89	52,51	83.501	3,75
SabuRaijua	2015	28,4	7499,04	53,28	85.970	7,76
SabuRaijua	2016	28,58	7631,86	54,16	88.826	7,6
SabuRaijua	2017	28,22	7778,35	55,22	91.512	2,75
SabuRaijua	2018	28,88	7925,37	55,79	94.410	2,12
KotaKupang	2011	34,4	28302,98	77,71	342.892	6,93
KotaKupang	2012	35	29606,93	78,37	362.104	8,38
KotaKupang	2013	33,8	30887,11	78,62	368.199	9,05
KotaKupang	2014	33,3	31961,99	77,58	380.084	11,38
KotaKupang	2015	39,7	33139,28	77,95	390.877	14,25
KotaKupang	2016	39,59	34368,57	78,14	402.286	14,2
KotaKupang	2017	40,22	35789,89	78,25	412.708	12,5
KotaKupang	2018	40,44	37237,39	78,84	423.800	10,17



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

IX. Lampiran: Surat keterangan cek plagiasi



X. Lampiran: Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi:

Nama :Desi Rahmianti
 Jenis Kelamin :Perempuan
 Tempat, tanggal lahir :Kupang, 26 Desember 1996
 Kewarganegaraan :Warga Negara Indonesia
 Agama :Islam
 Status :Belum Kawin
 Alamat Asal :Jl. Timor Raya km 9 Oesapa Kupang
 Alamat Domisili :Perum Polri Gowok
 No. HP :082138239152
 Email :Desirahmianti@gmail.com



Riwayat Pendidikan:

RA Al-Fitrah Kupang 2001-2002
 MI Al-Fitrah Kupang 2002-2008
 Mts As'Adiyah Sengkang 2008-2011
 MA Al-Ikhlas Bone 2011-2014
 Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah UIN Sunan
 Kalijaga Yogyakarta 2014-2017



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA